

LAPORAN TAHUNAN

**BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I
TAHUN 2018**



**BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-2907 9177 Fax. 021-2907 9274

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, sehingga Badan Pengawasan dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Tahunan 2018. Laporan Tahunan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Badan Pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama kurun waktu 2018. Pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, sehingga fungsi pengawasan Mahkamah Agung yang dijalankan oleh Badan Pengawasan diharapkan dapat memberikan nuansa perubahan untuk dapat mewujudkan kepercayaan publik kepada badan peradilan.

Badan Pengawasan telah melakukan berbagai terobosan secara transparan dan optimal serta berupaya terus menerus dalam meningkatkan mutu maupun hasil pengawasan dan kualitas pelayanan pengaduan yang lebih baik kepada publik. Peningkatan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana pengawasan dan peningkatan sarana yang berkaitan dengan pedoman pelaksana tugas pengawasan serta adanya akses kemudahan Sistem Informasi Pengawasan dalam penyampaian Laporan / Pengaduan.

Upaya nyata untuk melakukan pembenahan terhadap tertib pelaksanaan tugas akan terus menerus dilakukan, untuk itu seluruh aparat Badan Pengawasan dituntut untuk berperan aktif guna mendorong terwujudnya perubahan di lingkungan Badan Pengawasan.

Kiranya Laporan Tahunan Badan Pengawasan ini dapat memberikan gambaran capaian kinerja Badan Pengawasan dan dapat memberikan gambaran singkat kepada masyarakat luas seberapa jauh keberhasilan yang dicapai Badan Pengawasan dalam melaksanakan tugas khususnya berkaitan dengan pelayanan penanganan pengaduan dan terwujudnya lingkungan peradilan yang bersih dan bebas KKN.

Jakarta, 25 Januari 2019

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI



NUGROHO SETIADI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum	1
B. Visi dan Misi	1
C. Rencana Strategis	2
BAB II STRUKTUR ORGANISASI	3
A. Standard Operational Procedures (SOP).....	8
B. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	11
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN	11
A. Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	12
B. Pengelola Sarana dan Prasarana	38
C. Pengelolaan Keuangan	50
D. Regulasi Tahun 2018.....	55
BAB IV PENGAWASAN	57
A. PROGRAM PEMBAHARUAN	57
1. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) MARI Versi 3.0	57
2. Pembangunan Aplikasi E-Monitoring Pengawasan.....	60
3. Sistem Informasi Penelusuran Penanganan Pengaduan (SIP3)	67
4. Persiapan Piloting Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SNI ISO 37001:2016) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya	68
B. KEGIATAN BADAN PENGAWASAN	69
1. Penanganan Pengaduan	69
2. Sidang Majelis Kehormatan Hakim.....	71
3. Penjatuhan Hukuman Disiplin.....	73
4. Penguatan Sistem Pengawasan.....	74
5. Kegiatan Pemeriksaan Reguler.....	78
6. Satuan Tugas Khusus Pengawasan.....	80
7. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas.....	80
8. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).....	83
9. Penilaian Zona Integritas	85
10. Capaian Hasil Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)	87
11. Inspeksi Mendadak.....	87
12. Survei Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan Pengadilan.....	88
C. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)	88
D. IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI (SIWAS MA-RI)	90

E. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK	91
F. <i>INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IACM)</i>	91
G. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI	92
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	93
A.Kesimpulan.....	93
B.Rekomendasi	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum

Penanganan Pengaduan merupakan salah satu kinerja utama pada Badan Pengawasan sebagaimana yang terdapat pada Perma No 9 Tahun 2016. Salah satu penunjang keberhasilan penanganan pengaduan tersebut adalah adanya dukungan Teknologi Informasi yang terintegrasi dari pusat sampai pada satker di daerah yang dikenal dengan Aplikasi Siwas MA RI.

Badan Pengawasan telah melakukan berbagai terobosan secara transparan dan optimal serta berupaya terus menerus dalam meningkatkan mutu maupun hasil pengawasan dan kualitas pelayanan pengaduan yang lebih baik kepada publik diantaranya dengan penyempurnaan Aplikasi Siwas yang saat ini versi 3.

Selain Aplikasi Siwas MA RI, Badan Pengawasan juga berupaya mengembangkan Aplikasi E-Monitoring dan Evaluasi sebagai upaya mewujudkan Misi Badan Pengawasan yaitu Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

B. Visi dan Misi

Dalam menetapkan Rencana Strategis Badan Pengawasan mengacu pada Visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, dan dalam rangka mencapai Visi tersebut Mahkamah Agung RI menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut Badan Pengawasan telah menetapkan Visi yaitu *“Terwujudnya aparat peradilan yang bersih dan berwibawa”*.

Yang dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengintensifkan pengawasan fungsional;
2. Meningkatkan profesionalisme aparat Badan Pengawasan dan peradilan Tingkat Banding di bidang pengawasan;
3. Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

4. Terwujudnya aparatur yang profesional, bersih, netral, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

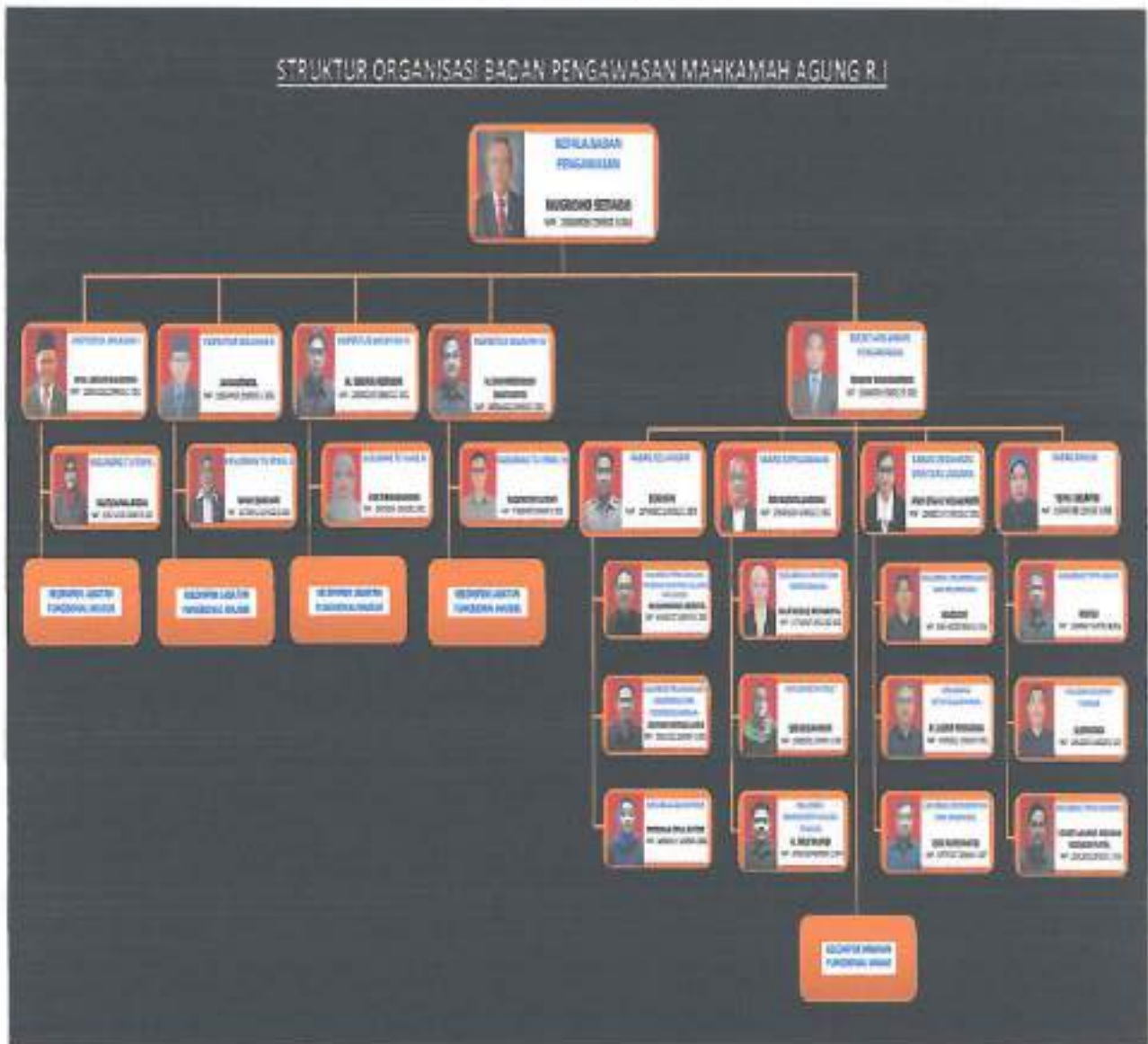
C. Rencana Strategis

Guna melaksanakan Visi dan Misi tersebut Badan Pengawasan telah merumuskan Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan yang akan dicapai secara nyata dan lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 tahun yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, yang digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Rencana Strategis Badan Pengawasan MA-RI

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078, 5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi			
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler			
	Jumlah pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas			
	Jumlah pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa			
	Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan			
	Jumlah Evaluasi LKJIP yang selesai dilakukan			
	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana			1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung
	Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang			
	Jumlah pegawai yang mengikuti Assesment			
	Jumlah Penguatan APIP			
	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan			
	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan			
	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan			

BAB II STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, struktur organisasi badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terdiri dari:

1. Eselon I

Badan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan.

2. Eselon II

Susunan Organisasi Eselon II Badan Pengawasan terdiri dari :

a. Sekretaris Badan Pengawasan

Sekretariat Badan Pengawasan dipimpin oleh Sekretaris Badan yang bertugas memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;
- 4) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan.

b. Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah Sumatera yang meliputi : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah I;

- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah I;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah I;
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah I;
- 5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah I;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah I.

c. Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah Jawa dan Bali yang meliputi : Banten, DKI Jakarta (termasuk unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung), Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah II;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah II;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah II;
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah II;
- 5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah II;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah II.

d. Inspektorat Wilayah III

Inspektorat Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang meliputi : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah III;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah III;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah III;
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah III;
- 5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah III;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah III.

e. Inspektorat Wilayah IV

Inspektorat Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang meliputi : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya (Papua).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah IV;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah IV;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah IV;
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah IV;
- 5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah IV;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah IV.

3. Eselon III

Organisasi Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Eselon II), yang didukung dengan jabatan struktural dibawahnya yang meliputi :

a. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon III yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan serta pembuatan Laporan Keuangan dan verifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan serta menerbitkan surat perintah pembayaran kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan verifikasi.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran;
- 2) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
- 3) Sub Bagian Akuntansi.

b. Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon III yang bertugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3), administrasi jabatan fungsional, pengurusan ASKES dan disiplin pegawai;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan kenaikan pangkat, pengajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan pemberhentian dan pensiun pegawai.

Bagian Kepegawaian terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Mutasi;
- 3) Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun.

c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana dipimpin oleh pejabat struktural eselon III yang bertugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja, serta urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi

di lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi serta penyusunan laporan;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan, penataan dan evaluasi pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi;
- 3) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan penyiapan bahan pelayanan informasi.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

d. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh pejabat struktural eselon III yang bertugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Umum mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- 2) Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan analisis kebutuhan pengadaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan.

Bagian Umum terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Sub Bagian Rumah Tangga;
- 3) Sub Bagian Perlengkapan.

A. Standard Operational Procedures (SOP)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Pada Tahun 2018 telah melakukan evaluasi dan revisi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap beberapa SOP yang sudah tidak sesuai lagi dan penambahan SOP berdasarkan kebutuhan organisasi, yaitu :

1. Evaluasi atas Pemenuhan Kebutuhan SOP Organisasi

SOP yang ada belum sepenuhnya mampu memenuhi semua kebutuhan organisasi dalam penataan hubungan kerja, sehingga diperlukan beberapa penambahan SOP baru guna memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada pada Badan Pengawasan yaitu:

a. SOP ORTALA

- 1) SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung
- 2) SOP Penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung
- 3) SOP Penanganan Dokumentasi
- 4) SOP Layanan Perpustakaan
- 5) SOP Peminjaman Buku Perpustakaan
- 6) SOP Pengembalian Buku Perpustakaan
- 7) SOP Peminjaman LHP
- 8) SOP Pengelolaan Arsip LHP
- 9) SOP PENGELOLAAN SERVER
- 10) SOP Peliputan Kegiatan

b. SOP KEPEGAWAIAN

- 1) SOP Penanganan Administrasi Cuti
- 2) SOP Pelaksanaan Acara Pengambilan Sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 3) SOP Pelaksanaan Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 4) SOP Pembuatan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) dan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan (SPMJ) Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 5) SOP Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

2. Evaluasi atas Format dan Kelengkapan SOP

Dokumen SOP yang dibuat dan sesuai dengan format dan kelengkapan yang diatur dalam Pedoman Penyusunan SOP tetapi diperlukan perubahan sesuai dengan kebutuhan organisasi yaitu :

a. KEPEGAWAIAN

- 1) 010. SOP Pelaksanaan Acara Pelantikan Pejabat Struktural Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 2) 012. SOP Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (Duk) Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 3) 013. SOP Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (Skp) Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

- 4) 014. SOP Pembuatan Surat Keputusan Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
 - 5) 018. SOP Penanganan Administrasi Jabatan Fungsional Pada Badan Pengawasan **Mahkamah Agung RI**
 - 6) 020. SOP Penanganan Administrasi Surat Keluar Kepegawaian Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
 - 7) 023. SOP Penanganan Administrasi Surat Tugas Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
 - 8) 025. SOP Penanganan Usulan Kenaikan Pangkat Hakim Tinggi Dan Hakim Yustial Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI **(Disempurnakan)**
 - 9) 026. SOP Penanganan Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Dengan Pangkat III/d Ke Bawah Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI **(Disempurnakan)**
 - 10) 027. SOP Penanganan Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Dengan Pangkat IV/a Ke Atas Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI **(Disempurnakan)**
 - 11) 028. SOP Penanganan Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Untuk Hakim Tinggi, Hakim Yustisial Dan Pegawai Dengan Pangkat IV/a Ke Atas Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI **(Disempurnakan)**
 - 12) 029. SOP Penanganan Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Untuk Pegawai Dengan Pangkat III/d Ke Bawah Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI **(Disempurnakan)**
 - 13) 038. SOP Usulan Pembuatan Penghargaan Satya Lancana Karya Satya Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
 - 14) 040. SOP Usulan Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI **(Disempurnakan)**
 - 15) 016. SOP Penanganan Administrasi Cuti Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- b. UMUM
- 1) 061. SOP Pengelolaan Arsip in Aktif
 - 2) 065. SOP Penyiapan Sidang Majelis Kehormatan Hakim antara Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial RI
- c. KEUANGAN
- 1) 001. SOP Laporan Keuangan SAK (Sistem Akuntansi Keuangan)
 - 2) 002. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

- 3) 003. SOP Belanja Pegawai dan Kekurangannya Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 4) 004. SOP Pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 5) 005. SOP Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawasan
- 6) 006. SOP Penyusunan Renstra Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- 7) 007. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Program Badan Pengawasan
- 8) 008. SOP Permintaan Uang Makan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawasan
- 9) 009. SOP Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

d. ORTALA

- 1) 041. SOP Penyusunan LAPTAH Badan Pengawasan (*disempurnakan*)
- 2) 042. SOP Penyusunan LKjIP Badan Pengawasan (*disempurnakan*)
- 3) 044. SOP Penerimaan Buku Perpustakaan
- 4) 045. SOP Tayangan Hukuman Disiplin Pada Website Mahkamah Agung RI
- 5) 046. SOP Penanganan LHP Kasus
- 6) 049. SOP Evaluasi SAKIP Satker Lingkungan Mahkamah Agung RI

B. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja. Aparatur Badan Pengawasan telah menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi.

Pada tahun 2018 SKP telah diterapkan untuk pelaksanaan kenaikan pangkat, pensiun dan penyesuaian ijazah. Kenaikan pangkat Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial 6 orang, kenaikan pangkat Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf 20 orang serta Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pegawai yang purnabakti 1 (satu) orang sebagai dasar kenaikan pangkat pengabdian.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI merupakan satuan kerja pengawasan fungsional yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung RI, dan Badan Peradilan dibawahnya dengan harapan pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya. Sumber daya Manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung meliputi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, staf, dan Honorcer yang terdiri dari:

- a) Pejabat Struktural :
 - Pejabat Eselon I : 1 orang
 - Pejabat Eselon II : 5 orang (Sekretaris dan 4 Inspektur wilayah)
 - Pejabat Eselon III : 4 orang
 - Pejabat Eselon IV : 16 orang
- b) Pejabat Fungsional
 - Hakim Tinggi : 38 orang
 - Hakim Yustisial : 17 orang
 - Auditor : 12 orang
 - Auditor Kepegawaian : 8 orang
 - Analis Kepegawaian : 1 orang
 - Pranata Komputer : 2 orang
- c) Staf : 41 orang
- d) Honorcer : 17 orang

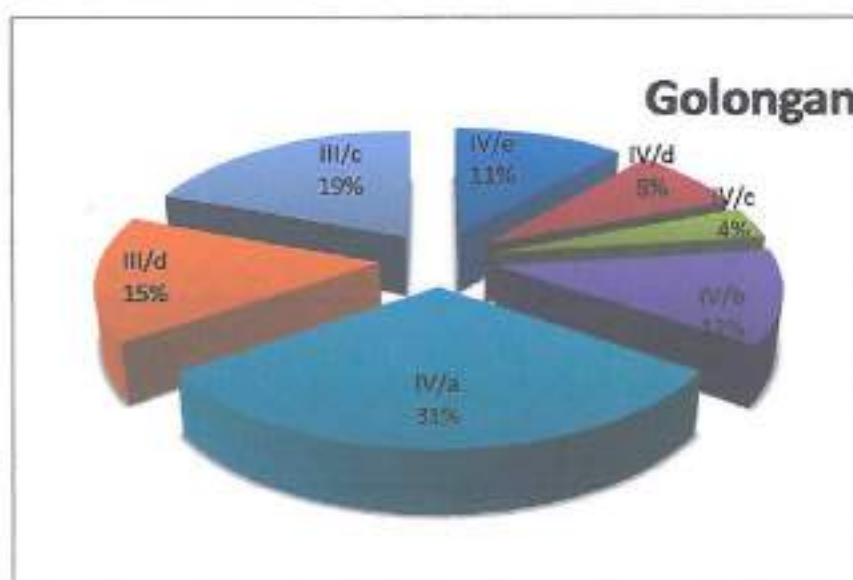
Pada tahun 2018, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 162 (seratus enam puluh dua) orang, yang terdiri dari Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, staf dan Honorcer, kondisi sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan terdiri dari Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV. Adapun untuk pengelompokan Pejabat Struktural ini berdasarkan pangkat/golongan, pendidikan, usia dan kelamin dapat dilihat pada tabel 3.1, tabel 3.2, tabel 3.3 dan tabel 3.4.

Tabel 3.1 Data pejabat struktural pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pembina Utama (IV/e)	3	11 %
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	2	8 %
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	4 %
4	Pembina Tk I (IV/b)	3	12 %
5	Pembina (IV/a)	8	31 %
6	Penata Tk I (III/d)	4	15 %
7	Penata (III/c)	5	19 %



Tabel 3.2 Data pejabat struktural pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	S3	1	4 %
2	S2	20	77 %
3	S1	5	19 %



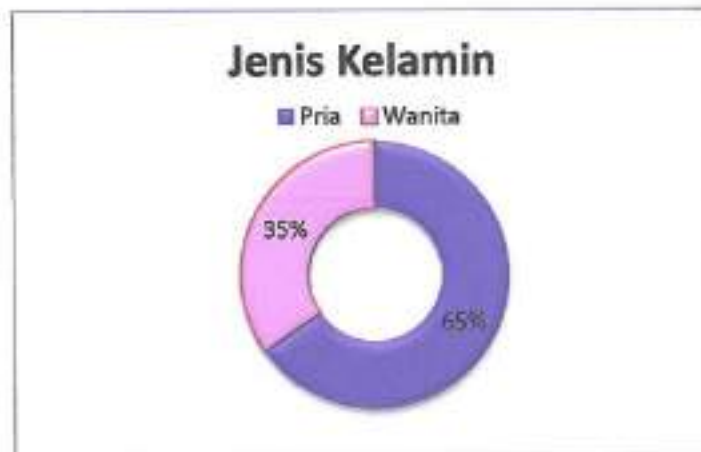
Tabel 3.3 Data pejabat struktural pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1	30 - 39	5	19 %
2	40 - 49	5	19 %
3	50 - 60	16	62 %



Tabel 3.4 Data pejabat struktural pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pria	17	65 %
2	Wanita	9	35 %

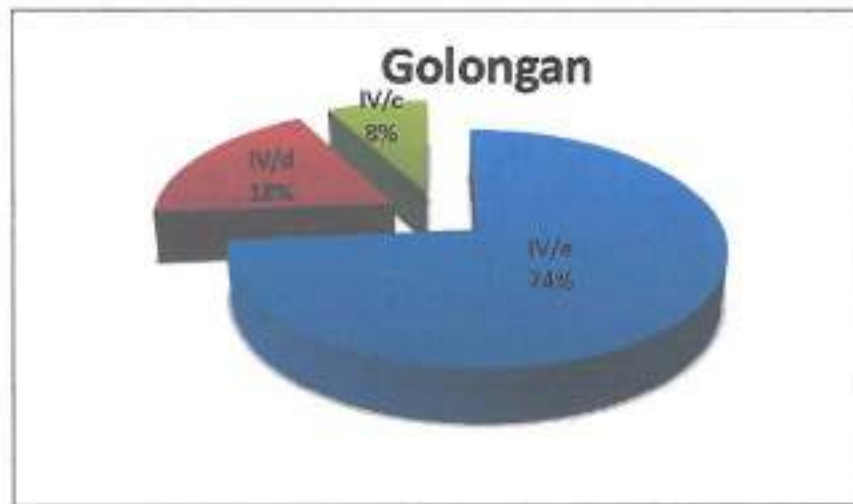


1.2. Pejabat Fungsional

Sumber Daya Manusia Pejabat Fungsional pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang terdiri dari Hakim Tinggi Pengawas, Hakim Yustisial, Auditor, Auditor Kepegawaian, Analis Kepegawaian dan Pranata Komputer. Adapun pangkat/golongan, pendidikan, usia dan kelamin tenaga teknis tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pembina Utama (IV/e)	28	74 %
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	7	18%
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	3	8 %



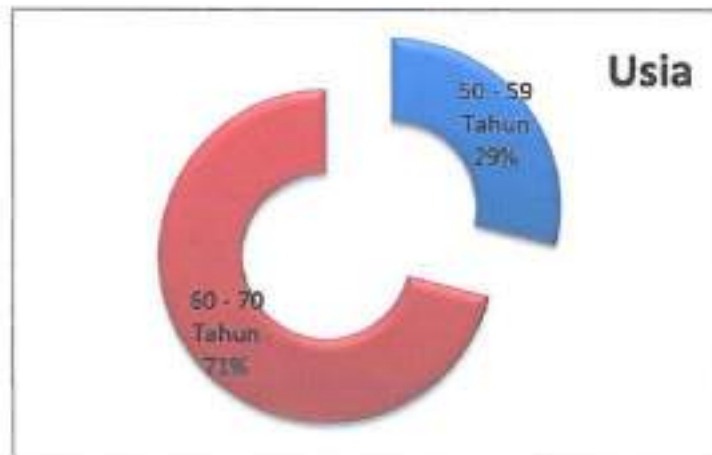
Tabel 3.6 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	S3	4	8 %
2	S2	23	62 %
3	S1	11	30 %



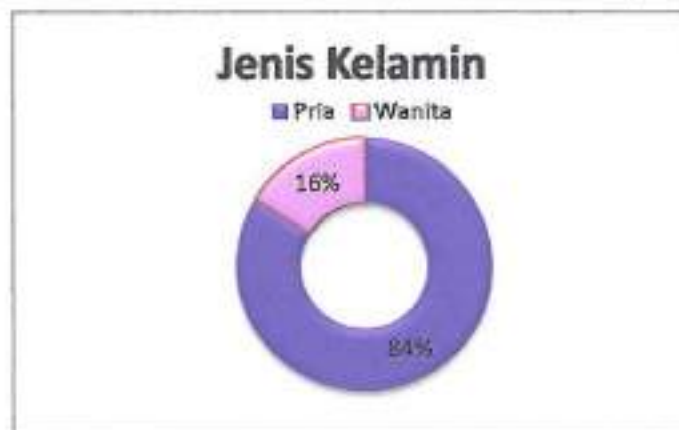
Tabel 3.7 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1	50 – 59	11	29 %
2	60 – 67	27	71 %



Tabel 3.8 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

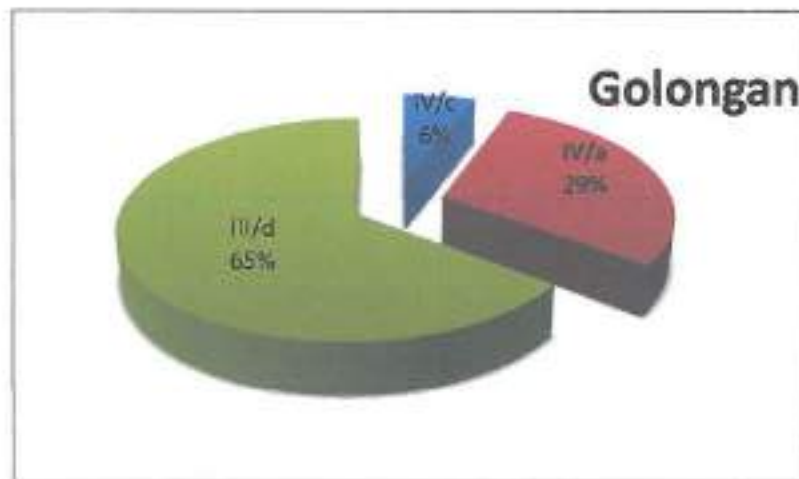
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pria	32	84 %
2	Wanita	6	16 %



1.3. Hakim Yustisial

Tabel 3.9 Data Hakim Yustisial pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	6 %
2	Pembina (IV/a)	5	29 %
3	Penata Tk. I (III/d)	11	65 %



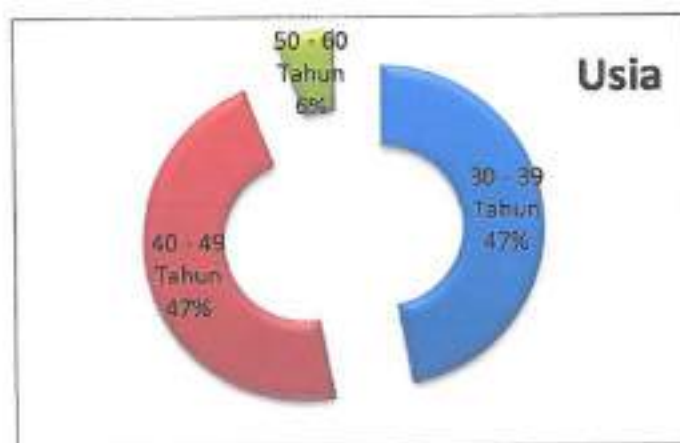
Tabel 3.10 Data Hakim Yustisial pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	S3	2	12 %
2	S2	12	70 %
3	S1	3	18 %



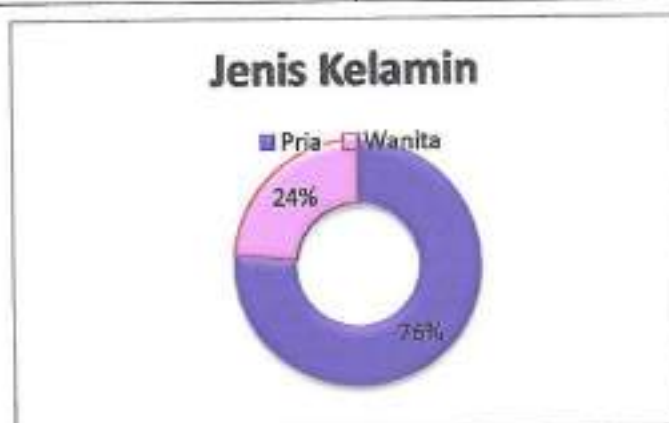
Tabel 3.11 Data Hakim Yustisial pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia.

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1	30 - 39	8	47%
2	40 - 49	8	47%
3	50 - 59	1	6%



Tabel 3.12 Data Hakim Yustisial pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

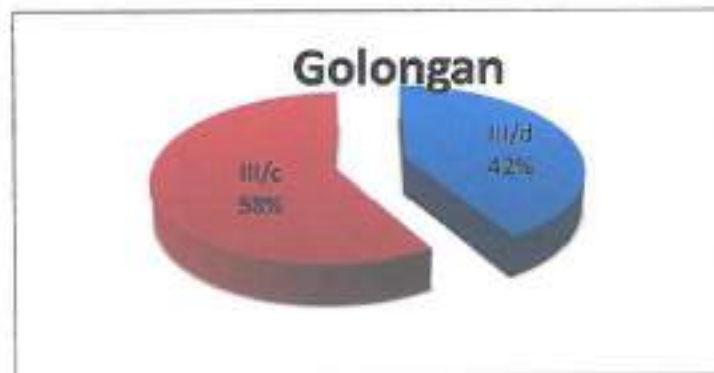
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pria	13	76%
2	Wanita	4	24%



1.4. Auditor

Tabel 3.13 Data Auditor pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/golongan.

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Penata Tk. I (III/d)	5	42 %
2	Penata (III/c)	7	58 %



Tabel 3.14 Data Auditor pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	S2	8	67%
2	S1	4	33%



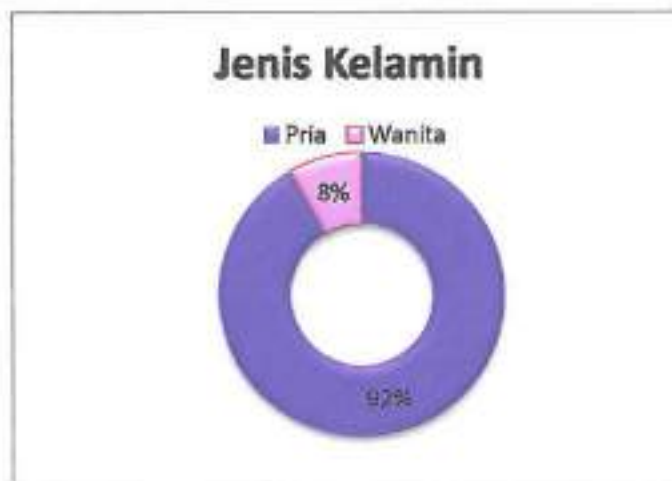
Tabel 3.15 Data Auditor pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1	30 - 39	8	67 %
2	40 - 49	4	33 %



Tabel 3.16 Data Auditor pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

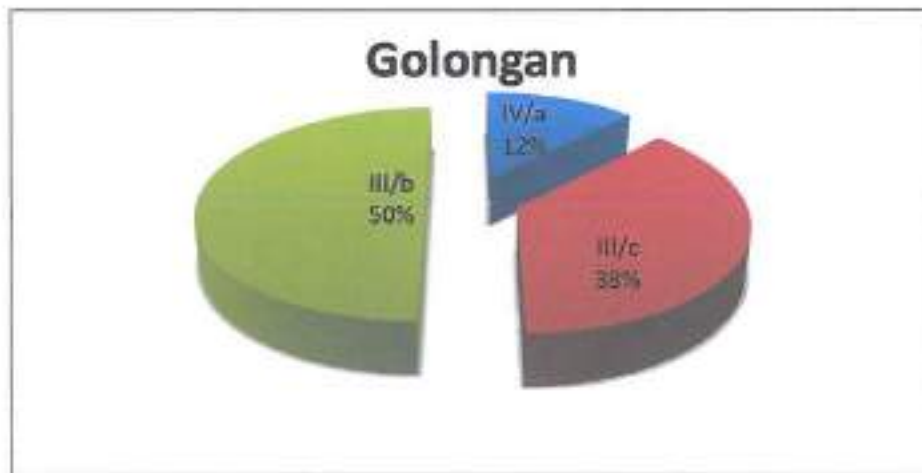
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pria	11	92%
2	Wanita	1	8%



1.5. Auditor Kepegawaian

Tabel 3.17 Data Auditor Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pembina (IV/b)	1	12%
2	Penata (III/c)	3	38%
3	Penata Muda Tk.I (III/b)	4	50%



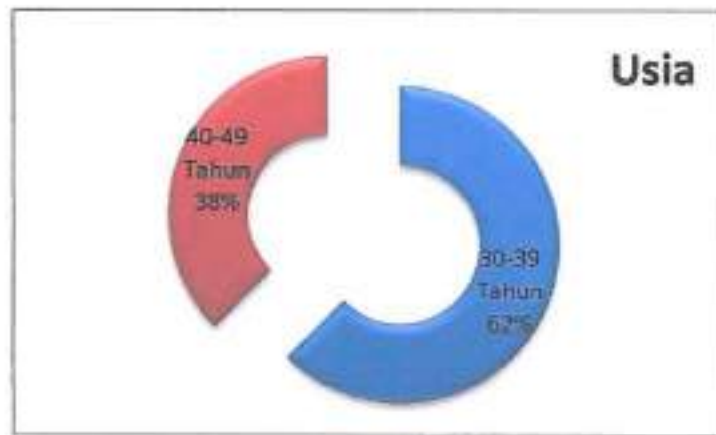
Tabel 3.18 Data Auditor Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	S2	1	12 %
2	S1	7	88 %



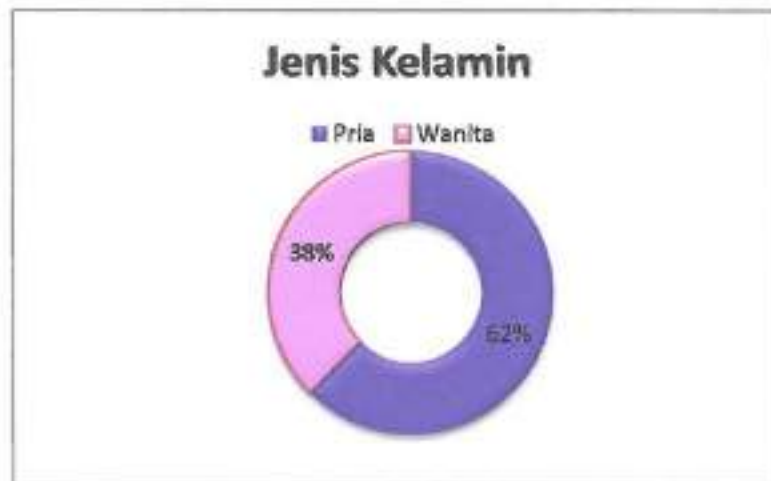
Tabel 3.19 Data Auditor Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1	30 – 39	5	62 %
2	40 – 49	3	38 %



Tabel 3.20 Data Auditor Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

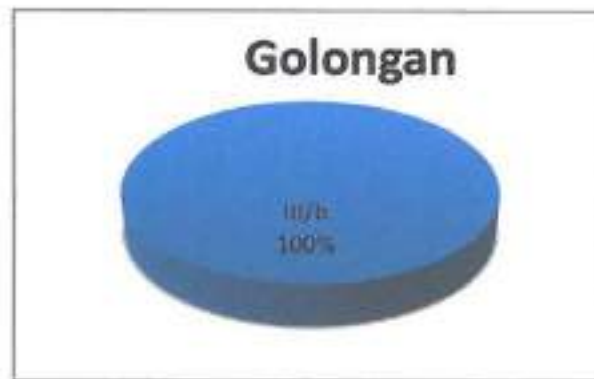
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pria	5	62 %
2	Wanita	3	38 %



1.6. Pranata Komputer

Tabel 3.21 Data Pranata Komputer pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Penata Muda Tk.I (III/b)	2	100 %



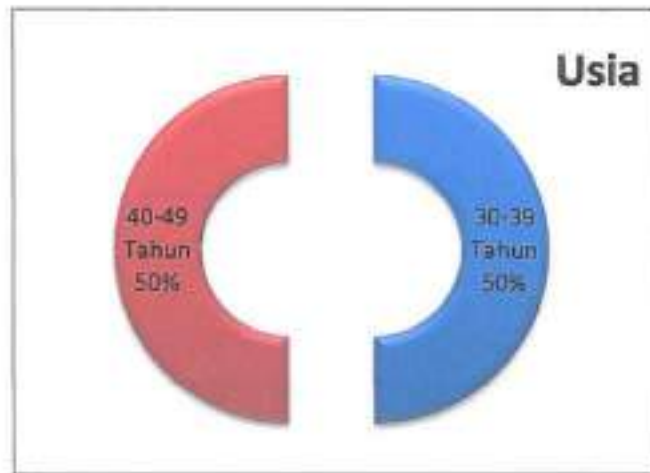
Tabel 3.22 Data Pranata Komputer pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	S-1	2	100 %



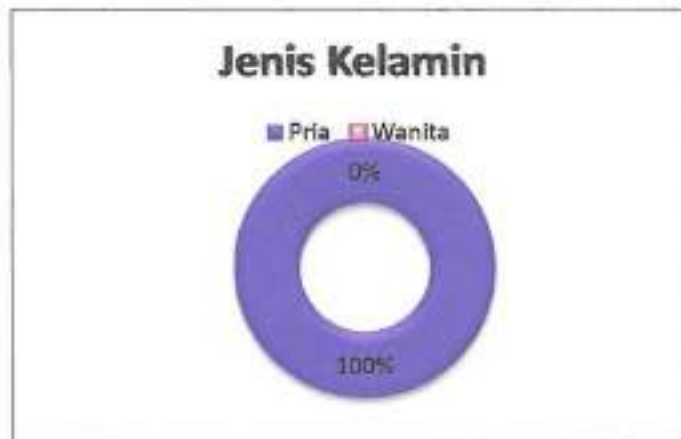
Tabel 3.23 Data Pranata Komputer Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1	30 – 39	1	50 %
2	40 - 49	1	50 %



Tabel 3.24 Data Pranata Komputer pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pria	2	100%
2	Wanita	0	0 %



1.7. Analisis Kepegawaian

Tabel 3.25 Data Analisis Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Penata (III/c)	1	100 %

Tabel 3.26 Data Analisis Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	SLTA	1	100 %

Tabel 3.27 Data Analisis Kepegawaian Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1	50 – 59	1	100 %

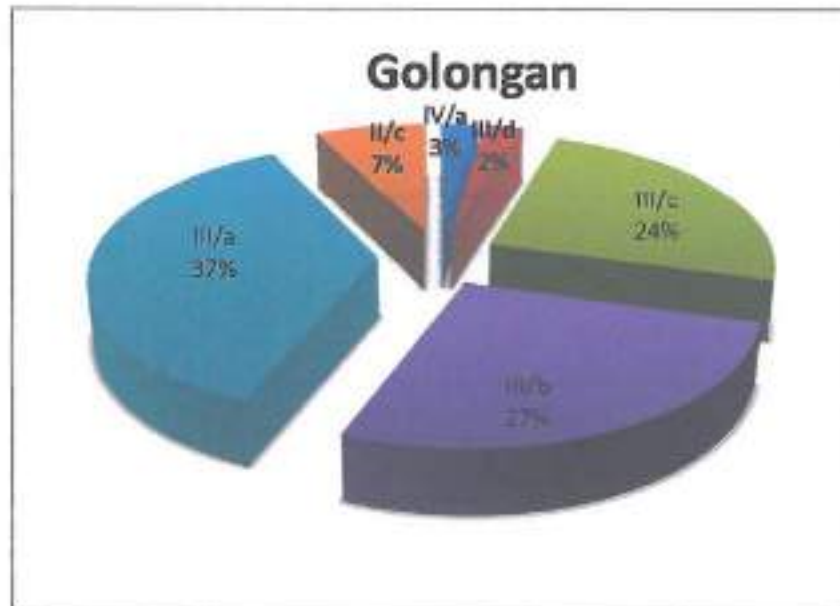
Tabel 3.28 Data Analisis Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pria	0	0%
2	Wanita	1	100 %

1.8. Staf

Tabel 3.29 Data Staf pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Penata Tk. I (IV/a)	1	3 %
2	Penata Tk. I (III/d)	1	2%
3	Penata (III/c)	10	24%
4	Penata Muda Tk.I (III/b)	11	27%
5	Penata Muda (III/a)	15	37%
6	Pengatur (II/c)	3	7%



Tabel 3.30 Data Staf pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	S2	10	24%
2	S1	26	63%
3	D3	1	3%
3	SLTA	4	10%



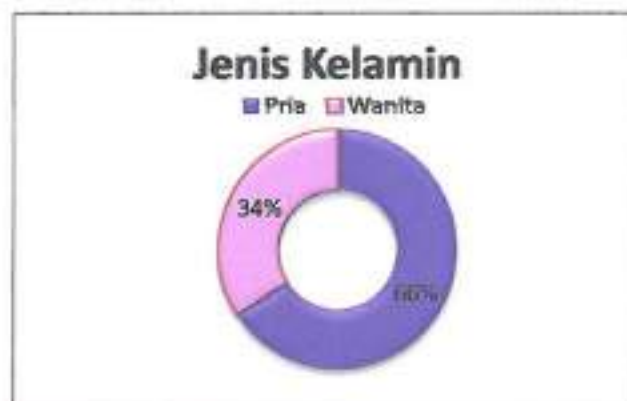
Tabel 3.31 Data Staf pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1	20-29	10	24 %
2	30-39	24	59%
3	40-49	4	10%
4	50-59	3	7%



Tabel 3.32 Data Staf pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

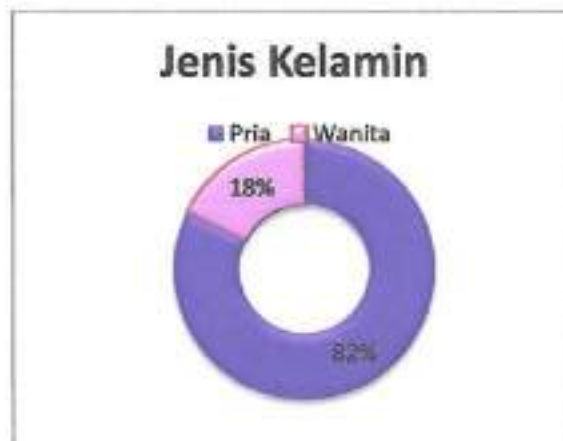
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pria	27	66 %
2	Wanita	14	34 %



1.9. Honorer

Tabel 3.33 Data Honorer pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pria	14	82%
2	Wanita	3	18%



2. PEGAWAI YANG LULUS PASCA SARJANA/S2 PADA TAHUN 2018 SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG.

No	Nama	Pendidikan	Keterangan
1.	Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H	Magister Hukum	Disetujui BKN
2.	Andy Mohamad Yusuf Bakri	Magister Hukum	Disetujui BKN
3.	Sri Widayanti, S.H.	Magister Managemen	Disetujui BKN
4.	Apriyadi Romian Kardono, S.E., Akt., C.A., MAk	Magister Akuntansi	Disetujui BKN
5.	Yusuf, S.E., Ak., CA	Magister Akuntansi	Disetujui BKN
6.	Ekasari Kurniwati, S.E.,M.A	Magister Akuntansi	Disetujui BKN

3. PROMOSI DAN MUTASI HAKIM TINGGI PENGAWAS

NO.	NAMA	ASAL DARI	MUTASI KE
1.	Turchan Badri, S.H., M.H	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makasar	Hakim Tinggi Pengawasan pada Badan Pengawasan

			MARI
2.	Dr. H. Ahmad Zainullah, S.H., M.H	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan	Hakim Tinggi Pengawasan pada Badan Pengawasan MARI
3.	Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Menado	Hakim Tinggi Pengawasa pada Badan Pengawasan MARI
4.	Drs. H. Muhammad, S.H., M.H	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten	Hakim Tinggi Pengawasan pada Badan Pengawasan MARI
5.	Kolonel Sus Reki Irene Lumme, S.H.,M.H	Hakim Tinggi Militer II Jakarta	Hakim Tinggi Pengawasan pada Badan Pengawasan MARI

4. PROMOSI DAN MUTASI JABATAN HAKIM TINGGI PENGAWAS PADA BADAN PENGAWASAN MARI

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	Inspektur Wilayah IV pada Badan Pengawasan MARI
2.	Aviantara, S.H., M.Hum	Inspektur Wilayah IV pada Badan Pengawasan MARI	Inspektur Wilayah II pada Badan Pengawasan MARI
3.	Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI

5. PROMOSI FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM DIANGKAT MENJADI STRUKTURAL ESELON IV PADA BADAN PENGAWASAN MARI

NO.	NAMA	ASAL DARI	MUTASI KE
1.	Muchtar Luthfi, S.H., M.H	Fungsional Umum pada Sekretaris Badan Pengawasan MARI	Kasubbag Inspektur Wilayah IV pada Badan Pengawasan MARI
2.	Dra. Yekti Handayani, S.H., M.Si	Kasubbag Inspektur Wilayah IV pada Badan Pengawasan MARI	Kasubbag Inspektur Wilayah III pada Badan Pengawasan MARI
3.	Sanda Fajelius Hasibuan, S.H	Fungsional Umum pada Kasubbag Rumah Tangga pada Badan Pengawasan MARI	Fungsional Umum pada Kasubbag Inspektur Wilayah I pada Badan

			Pengawasan MARI
4.	Nawangsih Ayu Hartami, S.Psi	Fungsional Umum pada Kasubbag Inspektur Wilayah II pada Badan Pengawasan MARI	Fungsional Umum pada Kasubbag Inspektur Wilayah IV pada Badan Pengawasan MARI
5.	Ridwan AR, Amd	Fungsional Umum pada Kasubbag Umum Kepegawaian pada Badan Pengawasan MARI	Fungsional Umum pada Kasubbag Inspektur Wilayah II pada Badan Pengawasan MARI

**6. KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN AUDIWAN TAHUN
2018**

NO.	NAMA	ASAL DARI	MUTASI KE
1.	Jufri Hardi, S.T., M.H	Auditor Pertama pada Badan Pengawasan MARI	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI
2.	Nurdiansyah, S.H.,MM	Auditor Pertama pada Badan Pengawasan MARI	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI
3.	Edi Gustiawan, S.H	Auditor Kepegawaian Pertama pada Badan Pengawasan MARI	Auditor Kepegawaian Muda pada Badan Pengawasan MARI
4.	Apriyadi Romian Kardono, S.E., A.Kt., C.A., M.Ak	Auditor Kepegawaian Pertama pada Badan Pengawasan MARI	Auditor Kepegawaian Muda pada Badan Pengawasan MARI
5.	Hendra Rahmadani, S.kom., M.M	Auditor Pertama pada Badan Pengawasan MARI	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI
6.	Ferri Taufik Ferdiansyah, S.E., Ak., C.A., M.Ak	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI	Auditor Madya pada Badan Pengawasan MARI

**7. PROMOSI DAN MUTASI FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN
PENGAWASAN MARI**

NO.	NAMA	ASAL DARI	MUTASI KE
1.	Zullvan Sugiantoro, S.T	Pranata Komputer Pertama Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah	Pranata Komputer Pertama pada Badan Pengawasan MARI

2.	Abu Samah, S.E., M.M., Ak	Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim	Fungsional Umum pada Badan Pengawasan MARI
3.	Mulia Karyadi, S.T., M.M	Kasubbag Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Lubuk Basung	Fungsional Umum pada Badan Pengawasan MARI
4.	Yanalia Nurmawati, S.E., S.H., M.ak	Fungsional Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Fungsional Umum pada Badan Pengawasan MARI
5.	Ekasari Kurniawati, S.E., MA	Fungsional Umum pada Dilmi III-12 Surabaya	Fungsional Umum pada Badan Pengawasan MARI

8. MUTASI KEPANGKATAN HAKIM TINGGI PENGAWAS PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, TAHUN 2018

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	T.M.T	PANGKAT/ GOL	T.M.T
1	Nugroho Setiadji, S.H.	IV/d	01-04-2014	IV/e	01-04-2018
2	Drs. H. Abduh Sulaeman, S.H., M.H	IV/d	01-04-2014	IV/e	01-04-2018
3	Rasyikin Aziz, S.H., M.H	IV/d	01-04-2014	IV/e	01-04-2018
4	Dr. Khaeril R., M.H	IV/d	01-04-2014	IV/e	01-04-2018
5	Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H	IV/d	01-04-2014	IV/e	01-04-2018
6.	Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H	IV/a	01-04-2014	IV/b	01-04-2018

9. DATA HAKIM TINGGI PENGAWAS DAN HAKIM YUSTISIAL YANG MENDAPATKAN KENAIKAN GAJI BERKALA PADA TAHUN 2018, SEBAGAI BERIKUT :

NO.	NAMA	MASA KERJA	Gol.	TMT.
1.	Aviantara, S.H., M.Hum	30 tahun	IV/d	01-03-2018
2.	Dr. Drs. H. Abduh Sulaeman, S.H., M.H	32 tahun	IV/d	01-04-2018

3.	Raditya Baskoro, S.H., M.Kn	18 tahun	IV/a	01-03-2018
4.	Iswan Herwin, S.H., M.H	32 tahun	IV/e	01-12-2018
5.	Simbar Kristianto, S.H.	30 tahun	IV/e	01-12-2018
6.	A. Syaifullah, S.H	32 tahun	IV/e	01-12-2018
7.	Benar Sihombing, S.H., M.Hum	30 tahun	IV/d	01-12-2018
8.	Suryawati, S.H., M.H	30 tahun	IV/d	01-12-2018
9.	Rudi Widodo, S.H., M.H	30 tahun	IV/d	01-12-2018
10.	Lindi Kusumaningtyas, S.H., M.H	30 tahun	IV/d	01-12-2018
11.	H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.H	32 tahun	IV/d	01-12-2018
12.	Anisa Shofiawati, S.H.	16 tahun	III/d	01-12-2018
13.	Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H	16 tahun	IV/a	01-12-2018
14.	Dr. H. Ahmad Syaviq, S.H., M.H	16 tahun	IV/a	01-12-2018
15.	Mario Parakas, S.H., M.H	16 tahun	III/d	01-12-2018
16.	Endang Lestari, S.H., M.Kn	16 tahun	III/d	01-12-2018
17.	Mohammad Syauqie, S.H., M.H	16 tahun	III/d	01-12-2018
18.	HarikaNova Yeri, S.H., M.H	16 tahun	III/d	01-12-2018
19.	Muh Irfan husaeni, S.Ag., M.S.I	16 tahun	III/d	01-12-2018

10. DATA PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI YANG MENDAPATKAN KENAIKAN GAJI BERKALA PADA TAHUN 2018, SEBAGAI BERIKUT :

NO	NAMA	MASA KERJA	T.M.T
1.	Drs. Erwin Widanarko, S.H., S.A.P., M.Pd	26 tahun	01-03-2018
2.	Subiyono, S.H	28 tahun	01-03-2018
3.	Nuzliana Abda, S.H., M.H	24 tahun	01-03-2018

4.	Dra Siti Zainab, S.H., M.M	26 tahun	01-03-2018
5.	Rohili, S.H., M.H	24 tahun	01-03-2018
6.	Mulyanto, S.H., M.H	14 tahun	01-03-2018
7.	Sri Widayanti, S.H., M.H	14 tahun	01-03-2018
8.	Sri Misgianti, S.H., M.H	20 tahun	01-03-2018
9.	Partijem	26 tahun	01-03-2018
10.	Desiyanto	24 tahun	01-03-2018
11.	Winarsih	24 tahun	01-03-2018
12.	Eko Purwanto, S.T., M.M	12 tahun	01-04-2018
13.	Marwendi Putra, S.T., M.M	12 tahun	01-04-2018
14.	Ferri Taufik Ferdiansyah, S.E., Ak., CA.,M.Ak	12 tahun	01-04-2018
15.	Muhammad Anis, S.E., Ak., CA.,	12 tahun	01-04-2018
16.	Yusuf, S.E., Ak	12 tahun	01-04-2018
17.	Imam Purnomo, S.E., Ak	12 tahun	01-04-2018
18.	Betty Kurnianingtyas, S. Kom	12 tahun	01-04-2018
19.	Supriyanto	09 tahun	01-04-2018
20.	Mawardi	09 tahun	01-04-2018
21.	Mochtar Luthfi, S.H	10 tahun	01-05-2018
22.	Bram Budi Nurcahyo, S.E., M.H	08 tahun	01-05-2018
23.	Nurdiansyah, S. H	08 tahun	01-10-2018
24.	Sodikin, S.E., S.H., M.H	16 tahun	01-12-2018
25.	Edi Gustiawan, S.H	10 tahun	01-12-2018

11. HAKIM TINGGI PENGAWAS DAN PEJABAT STRUKTURAL PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, YANG MEMASUKI PURNABAKTI/ PENSIUN PADA TAHUN 2018 SEBAGAI BERIKUT :

NO	NAMA	JABATAN	TMT PENSIUN
1	H. Arsil Marwan, S.H., M.H	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	01-01-2018
2.	H. Zulkarnain A. Rachman, S.H., M.H	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	01-06-2018

12. PENGHARGAAN SATYA LANCAHA 10 TAHUN YANG DIPEROLEH OLEH HAKIM YUSTISIAL, PEJABAT STRUKTUR, AUDITOR KEUANGAN, AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, TAHUN 2018 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

NO	NAMA	JABATAN	SATYA LANCAHA
1.	Moh. Ulul Ilmi, S.E	Staf Subbag Anggaran dan Perbendaharaan pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	10 Tahun

13. SDM PEJABAT/HAKIM TINGGI PENGAWAS, HAKIM YUSTISIAL, AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN, PEJABAT STURKTURAL SERTA STAF YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMTEK, ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:

No	Nama Bimtek	Jumlah peserta	Penyelenggara	Tujuan
1	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Semester II Tahun Anggaran 2017	2 orang	KPPN Jakarta VI	Peningkatan Kompetensi SDM
2	Diklat Substantif Manajemen Resiko di	26 orang	Badan Pengawasan MAR	Peningkatan Kompetensi

	Lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI			SDM
3	Diklat Sertifikasi Training of Trainer (TOT)	2 orang	Litbang Diklat Kumdil MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
4	Sosialisasi Aplikasi e-Monev	3 orang	Bappenas	Peningkatan Kompetensi SDM
5	Diklat Penjenjangan Auditor Muda	2 orang	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
6	Pelatihan Assesor	4 orang	Mahkamah Agung RI	Peningkatan Kompetensi SDM
7	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka Peningkatan Capability Aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk menunjang Reformasi Birokrasi	150 orang	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Kompetensi SDM
8	Bimtek Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian	9 orang	BKN Pusat	Peningkatan Kompetensi SDM
9	Diklat Substantif Manajemen Resiko	24 orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
10	Assesment (Hakim Tinggi Tingkat Banding, Hakim Tingkat Pertama dan staf Bawas)	27 orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM

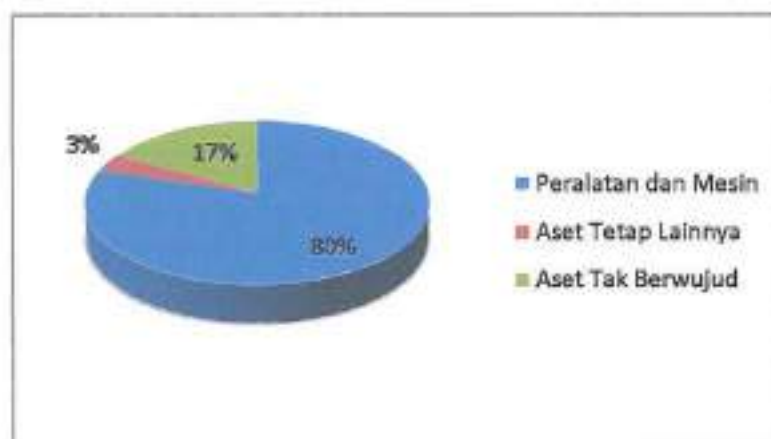
11	Assesment	4 Orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
12	Sosialisasi Per-13/PB/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2018	3 Orang	KPPN Jakarta VI	Peningkatan Kompetensi SDM
13	Pendidikan dan Pelatihan Auditor Ahli Pertama	1 Orang	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
14	Pelatihan Penjenjangan Auditor Kepegawaian Tingkat I (Auditor Kepegawaian Pratama)	4 Orang	BKN	Peningkatan Kompetensi SDM
15	Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pratama di lingkungan APIP	6 Orang	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
16	Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA TA 2018	2 Orang	KPPN Jakarta VI	Peningkatan Kompetensi SDM
17	Bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	40 Orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana (BMN) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2018 dikelompokkan :

➤ 1.808 unit peralatan dan mesin	Rp. 12.464.038.691
➤ 2.290 buah aset tetap lainnya	Rp. 535.403.685
➤ 12 unit aset tak berwujud	Rp. 2.624.583.965
Total pengelolaan sarana dan prasarana	Rp. 13.372.343.593

Grafik 3.1 Prosentase Sarana dan Prasarana Badan Pengawasan



Pengelolaan sarana dan prasarana dititikberatkan pada :

a) Perolehan Sarana dan Prasarana

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi : barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tahun 2018, Badan Pengawasan memperoleh BMN melalui pembelian dengan DIPA tahun 2018 maupun hibah dari pihak luar

1) Pembelian

Perolehan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari pembelian dengan anggaran DIPA tahun anggaran 2018 adalah 153 Unit dengan Total Rp 493.373.920 (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.34 Perolehan Barang Milik Negara

No	Uraian	Volume	Nilai
1.	Lemari besi/metal	57	117.591.920
2.	Filling cabinet besi	31	73.315.000
3.	CCTV- Camera Control Television System	15	24.750.000
4.	Perkakas kantor lainnya	1	1.375.000
5.	Sice	1	42.350.000
6.	Televisi	1	17.798.500
7.	Unit Power Supply	1	19.522.500
8.	P.C Unit	10	45.880.000
9.	Lap Top	25	118.917.420
10.	Printer (peralatan personal komputer)	10	29.400.000
11.	Rak Server	1	3.074.500
	TOTAL	153	493.373.920

2) Hibah masuk

Perolehan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Hibah dari Sustain UNDP berupa 1 Paket (Pengembangan aplikasi SIWAS) dengan Total Rp 1.272.450.794 (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

3) Transfer Masuk

Perolehan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Transfer Masuk adalah 42 Unit dengan Total Rp 507.848.035 (lima ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.35 Perolehan Barang Milik Negara

No	Uraian	Volume	Nilai
1.	Meja kerja kayu	30	442.802.832
2.	Sice	12	65.045.203
	TOTAL	153	507.848.035

b) Pemeliharaan

Sarana dan prasarana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Sebagian besar hasil Transfer Masuk dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI maupun dari DIPA Badan Pengawasan sendiri. Badan Pengawasan memiliki 1.808 buah peralatan dan mesin yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan sehingga mampu menunjang tugas fungsi kantor.

Badan Pengawasan memiliki 50 buah peralatan dan mesin yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan sehingga mampu menunjang tugas fungsi kantor.

1) Pemeliharaan Inventaris Kantor

Pemeliharaan dan perawatan telah dilakukan terhadap P. C Unit, Printer, Laptop dan Mesin Penghancur kertas.

2) Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas pada Badan Pengawasan tahun 2018, telah dilakukan pada 4 unit station wagon. Dimana kendaraan dinas tersebut melekat ke jabatan masing-masing pejabat eselon 3.

Perawatan dan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan terhadap kendaraan dinas tersebut antara lain : Perpanjangan STNK, Pengisian BBM, Penggantian sparepart, Service AC, Pergantian oli mesin, Service berkala, spooring & Balancing dan Pergantian ban.

3) Pemeliharaan Kendaraan Operasional

Untuk menunjang operasional perkantoran, disediakan 6 unit station wagon, 1 unit Micro Bus dan 5 unit sepeda motor.

Perawatan dan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan terhadap kendaraan dinas tersebut antara lain : Perpanjangan STNK, Pengisian BBM, Penggantian sparepart, Service AC, Pergantian oli mesin, Service berkala, spooring & Balancing dan Pergantian ban.

c) Penghapusan Barang Milik Negara

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) tahun anggaran 2018 adalah 59 Unit dengan Total Rp 452.167.842 (empat ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

LAMPIRAN : SUMATRA KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA - RI
 NOMOR : 1164 / BUA / SK / 23 / 2018
 TANGGAL : 23 Maret 2018

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN BANGUNAN YANG DISUTUJUI UNTUK DIKAWASUKAN
 PADA BADAN PENGAWASAN MAHARAJAH ADUNG REPUBLIK INDONESIA

NO	KODE BARANG	SLIP	NAMA BARANG	BERSUATU	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	NILAI LMBT (Rp)	KONDISI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3100100003	35	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
2	3100100003	36	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
3	3100100003	37	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
4	3100100003	38	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
5	3100100003	39	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
6	3100100003	40	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
7	3100100003	41	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
8	3100100003	42	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
9	3100100003	43	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
10	3100100003	44	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
11	3100100003	45	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
12	3100100003	46	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
13	3100100003	47	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
14	3100100003	48	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
15	3100100003	49	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
16	3100100003	50	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
17	3100100003	51	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
18	3100100003	52	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
19	3100100003	53	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
20	3100100003	54	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
21	3100100003	55	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
22	3100100003	56	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
23	3100100003	57	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
24	3100100003	58	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
25	3100100003	59	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
26	3100100003	60	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
27	3100100003	61	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
28	3100100003	62	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
29	3100100003	63	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
30	3100100003	64	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
31	3100100003	65	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
32	3100100003	66	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	
33	3100100003	67	Laptop	Sony Vaio VPCZ1150G	2019	19.751.782	25.000	Rusak Berat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	3100100003	68	Laptop	Sony Vaio SWS121000	2012	18.673.674	25.000	Rusak Berat	
21	3050300010	3	Mobile Gateway	Netix G5	2011	3.126.000	10.000	Rusak Berat	
22	3050300010	4	Mobile Gateway	Netix G5	2011	2.126.000	10.000	Rusak Berat	
23	3050300010	5	Mobile Gateway	Netix G5	2011	3.126.000	10.000	Rusak Berat	
24	3050300010	6	Mobile Gateway	Netix G5	2011	3.126.000	10.000	Rusak Berat	
25	3100300004	14	Scanner Portabel	AlfaScan Jazpacan AS 1212	2013	1.816.952	20.000	Rusak Berat	
26	3100300004	20	Scanner Portabel	AlfaScan Jazpacan AS 1212	2013	1.816.952	20.000	Rusak Berat	
27	3100300004	31	Scanner Portabel	AlfaScan Jazpacan AS 1212	2013	1.816.952	20.000	Rusak Berat	
28	3100300003	89	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L802	2012	3.108.283	5.000	Rusak Berat	
29	3100300003	79	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Power IP 100	2019	3.952.830	10.000	Rusak Berat	
30	3100300003	80	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Power IP 100	2019	3.952.830	10.000	Rusak Berat	
31	3100300003	81	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Power IP 100	2019	3.952.830	10.000	Rusak Berat	
32	3100100001	21	PC Unit	Acer M8835	2007	12.882.000	5.000	Rusak Berat	
33	3100100001	88	PC Unit	Acer	2011	18.182.000	5.000	Rusak Berat	
34	3100100001	89	PC Unit	Acer	2011	18.182.000	5.000	Rusak Berat	
35	3100100001	89	PC Unit	HP Pavilion D5-1120D	2012	8.904.790	5.000	Rusak Berat	
36	3100100001	89	PC Unit	HP Pavilion D5-1120D	2012	8.904.790	5.000	Rusak Berat	
37	3050300002	2	Jam Elektronik	Sako Type 384	2007	882.000	2.000	Rusak Berat	
38	3050300002	4	Jam Elektronik	Sako Type 413	2007	882.000	2.000	Rusak Berat	
39	3050300011	1	Unit Power Supply	Ups Proline 1200 VA	2007	2.282.000	5.000	Rusak Berat	
40	3050300011	4	Unit Power Supply	Ups Proline 1200 VA	2007	2.282.000	5.000	Rusak Berat	
41	3050300011	13	Unit Power Supply	Furubau	2209	1.208.000	5.000	Rusak Berat	
42	3050300011	13	Unit Power Supply	Furubau	2209	1.208.000	5.000	Rusak Berat	
43	3050300011	15	Unit Power Supply	Furubau	2209	1.208.000	5.000	Rusak Berat	
44	3050300017	19	Unit Power Supply	Apa-Chu 800VA APC 800W	2012	1.214.000	5.000	Rusak Berat	
45	3050300017	20	Unit Power Supply	Apa-Chu 800VA APC 800W	2012	1.214.000	5.000	Rusak Berat	
46	3050300017	25	Unit Power Supply	Leptone Neutron 800va	2012	824.380	5.000	Rusak Berat	
47	3050300017	28	Unit Power Supply	Leptone Neutron 800va	2012	824.380	5.000	Rusak Berat	
48	3050300017	33	Unit Power Supply	Leptone Neutron 800va	2012	824.380	5.000	Rusak Berat	
49	3050300017	35	Unit Power Supply	Leptone Neutron 800va	2012	824.380	5.000	Rusak Berat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	300200047	38	Unit Power Supply	Laptops Neutron 650va	3013	824,200	3,000	Rusak Berat	
81	300200047	39	Unit Power Supply	Laptops Neutron 800va	3013	824,200	9,000	Rusak Berat	
82	300200047	40	Unit Power Supply	Laptops Neutron 650va	3013	824,200	3,000	Rusak Berat	
93	300200090	3	Dispenser	Samsung	2010	4.326,730	3,000	Rusak Berat	
94	300201000	24	Pesawat Telepon	Panasonic	3010	311,130	1,000	Rusak Berat	
96	300201000	37	Pesawat Telepon	Panasonic	3090	311,130	1,000	Rusak Berat	
88	300201000	312	Kursi Prol/Metal	Indahsari	3010	1.208,510	2,000	Rusak Berat	
87	300201000	330	Kursi Besi/Metal	Yudi	3010	10.402,300	10,000	Rusak Berat	
85	300201000	383	Kursi Besi/Metal	Kursi Rapat MTMULIDNAL	3010	7.680,000	5,000	Rusak Berat	
85	300200019	5	Stasiun	SAWA	3009	180,900	1,300	Rusak Berat	
JUMLAH						482.187,840	788.800		

Bandung, JAWABTA



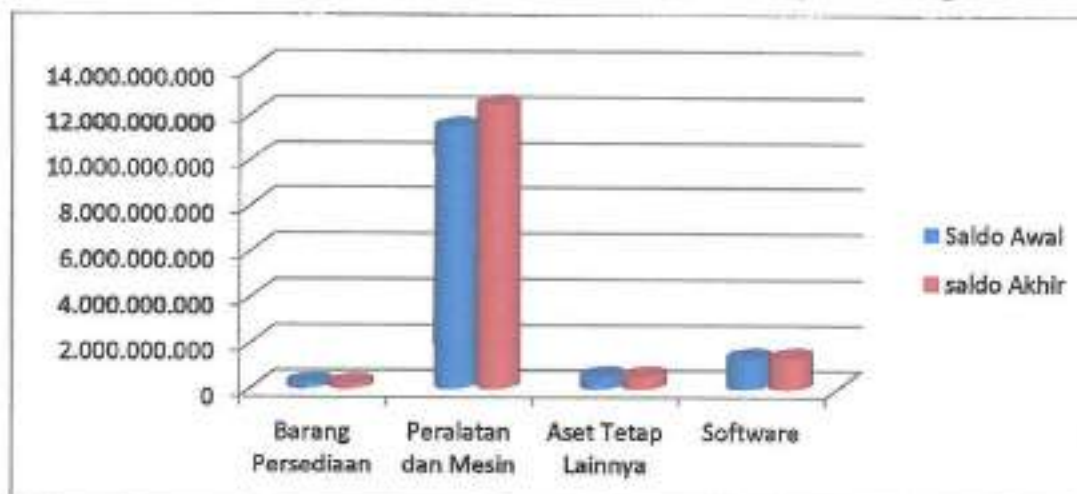
d) Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Badan Pengawasan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 265.932.132 (*dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah.*), jumlah tersebut terdiri dari:

- saldo awal per 1 Januari 2018 sebesar Rp247.223.574 (*dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah*)
- total pembelian persediaan selama Tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp529.963.250 (*lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*)
- total distribusi sebesar Rp527.513.305 (*lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah*)

Berdasarkan data diatas, Posisi Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI mulai awal tahun sampai dengan Bulan Desember 2018 dapat terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.2 Pengelola Sarana dan Prasarana Barang Milik Negara



**HASIL OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2018**

Tujuan dari dilakukannya Opname Fisik Barang Persediaan untuk memastikan kesamaan antara data di Aplikasi Persediaan dengan jumlah barang yang riil, yang rinciannya sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Kode Barang	Kuantitas Barang				Kondisi Barang	
			Menurut Laporan persediaan		Hasil cek fisik		Baik	Usang
		11111						
		1010901001						
		ALAT TULIS						
1	Balpoint Fastar	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
2	Pulpen Gel (Unibal)	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
3	Pensil 2B	000003	87	Buah	87	Buah	Baik	-
4	Spidol Marker Biru	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
5	Stabilo Boss (warna Warn)	000005	54	Buah	54	Buah	Baik	-
6	Spidol Whiteboard	000006	16	Buah	16	Buah	Baik	-
7	Pulpen Fajate Tuliup (660)	000007	26	Buah	26	Buah	Baik	-
8	Buku Ekpedisi	000008	43	Buku	45	Buku	Baik	-
9	Spidol Kecil Warna Warni	000009	4	Buah	4	Buah	Baik	-
10	Snowman V3 Ballpoint	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
11	Unibal Rosey	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
12	Ordner Gungyu 401	000012	18	Buah	18	Buah	Baik	-
13	Ordner Gungyu 403	000013	26	Buah	26	Buah	Baik	-
14	Ball Point Signa	000014	0	Buah	0	Buah	-	-
15	Pulpen Kario	000015	0	Buah	0	Buah	-	-
16	Pulpen Jayko Gel warna biru	000016	115	Buah	115	Buah	Baik	-
17	Pulpen Jayko Gel warna Hitam	000017	110	Buah	110	Buah	Baik	-
18	Baterai ABC besar	000018	0	Set	0	Set	-	-
19	Balpoint Baliner	000019	64	Buah	64	Buah	Baik	-
20	Pulpen Unibal Gel Impact	000020	204	Buah	204	Buah	Baik	-
21	Map merah Logo	000021	1805	Lembar	1805	Lembar	Baik	-
22	Map kuning Logo	000022	1.461	Lembar	1461	Lembar	Baik	-
23	Map hijau Logo	000023	882	Lembar	882	Lembar	Baik	-
24	Map Biru logo	000024	2073	Lembar	2073	Lembar	Baik	-
25	Map orange logo	000025	1065	Lembar	1065	Lembar	Baik	-
26	Pensil HB	000026	0	Buah	0	Buah	-	-

27	Pulpen Keras Gel Hitam	000027	0	Buah	0	Buah	-	-
28	Ballpoint C4 FASTER	000028	0	Buah	0	Buah	-	-
29	Pencil mekanik rotiring	000029	8	Buah	8	Buah	Baik	-
30	isi pensil rotiring 0,5	000030	15	Pad	15	Pad	Baik	-
31	Jayko pen stand	000031	17	Buah	17	Buah	Baik	-
32	Ballpoint Promoci	000032	0	Buah	0	Buah	-	-
33	Pulpen fasber PE	000033	0	Buah	0	Buah	-	-
34	Pulpen fasber EC 8	000034	0	Buah	0	Buah	-	-
35	Pulpen Scotch Magic	000035	0	Buah	0	Buah	-	-
36	Ballpoint fasber C6	000036	42	Buah	42	Buah	-	-
37	Pulpen Hero 556	000037	0	Buah	0	Buah	-	-
38	Spindel Permana	000038	25	Buah	25	Buah	-	-
39	Pulpen 4 warna	000039	30	Buah	30	Buah	-	-
40	Pulpen partal pelanbikan	000040	0	Buah	0	Buah	-	-
41	Snowman V5 Ballpoint	000041	194	Buah	194	Buah	-	-
42	Pulpen penghapus	000042	9	Buah	9	Buah	-	-
TINTA TULIS, TINTA STEMPER		1010001002						
43	Stempel Perma	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
44	Stempel Color	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
45	Tinta Color	000006	20	Buah	20	Buah	Baik	-
46	Tinta Hero	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
47	isi pulpen gantel	000008	0	Botol	0	Botol	-	-
PENCIPT BERTAS		1010001009						
48	Paper Clip	000001	35	Kotak	35	Kotak	Baik	-
49	Binder Clips 107	000002	41	Kotak	41	Kotak	Baik	-
50	Binder Clips 135	000003	32	Kotak	32	Kotak	Baik	-
51	Klip	000004	0	Kotak	0	Kotak	-	-
52	Binder Clip 111	000005	29	Kotak	29	Kotak	Baik	-
53	Binder Clip 100	000006	0	Kotak	0	Kotak	-	-
54	Binder Clip No 200	000007	29	Kotak	29	Kotak	Baik	-
55	Binder Clip 200	000008	10	Kotak	10	Kotak	Baik	-
56	Peper Clip Warna	000009	25	Kotak	25	Kotak	Baik	-
57	Push Pin	000010	25	Kotak	25	Kotak	Baik	-
58	Pembolong Kertas	000011	3	Buah	3	Buah	Baik	-
59	Acco besi	000012	979	Set	979	Set	Baik	-
60	Grand Book	000013	0	Buah	0	Buah	-	-
61	Binder Clip 105	000014	0	Kotak	0	Kotak	-	-
62	Spiral Plastik UK 1/4"	000015	0	Buah	0	Buah	-	-
63	Spiral Plastik UK 5/16"	000016	0	Buah	0	Buah	-	-
64	Spiral Plastik UK 3/8"	000017	0	Buah	0	Buah	-	-
65	Spiral Plastik UK 7/16"	000018	0	Buah	0	Buah	-	-
66	Spiral Plastik UK 1/2"	000019	0	Buah	0	Buah	-	-
67	Spiral Plastik UK 9/16"	000020	0	Buah	0	Buah	-	-
68	Spiral Plastik UK 5/8"	000021	0	Buah	0	Buah	-	-
69	Spiral Plastik UK 3/4"	000022	0	Buah	0	Buah	-	-
70	Spiral Plastik UK 1"	000023	0	Buah	0	Buah	-	-
71	Spiral Plastik UK 1 1/4"	000024	0	Buah	0	Buah	-	-
72	Spiral Plastik UK 1 1/8"	000025	0	Buah	0	Buah	-	-
73	Spiral Plastik UK 1 1/2"	000026	0	Buah	0	Buah	-	-
74	Spiral Plastik UK 1 3/4"	000027	0	Buah	0	Buah	-	-
75	Spiral Plastik UK 2"	000028	0	Buah	0	Buah	-	-
PENGHAPUS/KOREKTOR		1010001006						
76	Penghapus Mesh Reck 1 BMT	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
77	Penghapus Pensil	000002	92	Buah	92	Buah	Baik	-
78	Tip Ex Pantal	000003	23	Buah	23	Buah	Baik	-
79	Penghapus Mesh Kebik	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
80	Penghapusan pulpen	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
81	Penghapusan whiteboard	000006	5	Buah	5	Buah	Baik	-
82	Stablis ring box	000007	20	Buah	20	Buah	Baik	-
83	Tip Ex Correction	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
BUKU TULIS		1010001005						
84	Buku Register Besar	000001	0	Buku	0	Buku	-	-
85	Buku Register Sedang	000002	0	Buku	0	Buku	-	-
86	Buku Register Kecil	000003	0	Buku	0	Buku	-	-
87	Buku Register Panjang	000004	0	Buku	0	Buku	-	-
88	Buku Pengawasan Kredit	000005	0	Buku	0	Buku	-	-
89	Buku Yanda Terima LMP	000006	65	Buku	65	Buku	Baik	-
90	Buku Bon Permintaan ATK	000007	8	Buku	8	Buku	Baik	-

91	Dokumen Pengadaan	000008	0	Set	0	Set	-	-
92	Standard Buku IMAX	000009	0	Buku	0	Buku	-	-
93	Buku Agenda Folió 500	000010	4	Buku	4	Buku	Baik	-
94	Buku Agenda Folió 200	000011	5	Buku	5	Buku	Baik	-
95	Buku agenda Folió 100	000012	5	Buku	5	Buku	Baik	-
96	Formulir hasil pembelajaran	000013	23	Buku	23	Buku	Baik	-
97	Tanda terima surat	000014	30	Buku	30	Buku	Baik	-
98	Peminjaman inventaris	000015	6	Buku	6	Buku	Baik	-
99	Not box	000016	0	Buku	0	Buku	-	-
100	Kwitansi	000017	6	Buku	6	Buku	Baik	-
101	Buku Daftar Tamu	000018	15	Buku	15	Buku	Baik	-
ORDNER DAN MAP		1010301006						
102	Stap Map	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
103	Map Snelhacter	000002	0	Lembar	0	Lembar	-	-
104	Ordner	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
105	Box File	000004	14	Buah	14	Buah	Baik	-
106	Map LHP	000005	0	Lembar	0	Lembar	-	-
107	Map Boca	000006	0	Lembar	0	Lembar	-	-
108	Rado Arch File	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
109	Map Tulang Badan Pengawasan	000008	0	Lembar	0	Lembar	-	-
110	Map Budru	000009	0	Lembar	0	Lembar	-	-
111	Box file pakai tutup	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
112	Spring file plastik	000020	214	Buah	214	Buah	Baik	-
113	box file bantex	000012	99	Buah	99	Buah	Baik	-
114	Clear holder F4	000013	6	Buah	6	Buah	Baik	-
115	Ordner bantex folio	000014	55	Buah	55	Buah	Baik	-
116	Bisnis file plastik	000015	0	Buah	0	Buah	-	-
117	Dokumen Keper Semi Kulit	000017	0	Buah	0	Buah	-	-
118	Notepad Holder Kulit	000018	0	Buah	0	Buah	-	-
119	Map Plastik	000019	176	Lembar	176	Lembar	Baik	-
120	Map Agro Pengadaan	000020	0	Buah	0	Buah	-	-
PENGGAJIS		1010301007						
121	Pengajis Besi 30 CM	000001	1	Buah	1	Buah	Baik	-
122	Pengajis plastik 30 CM	000002	5	Buah	5	Buah	Baik	-
123	Pengajis Besi 50 CM	000003	12	Buah	12	Buah	Baik	-
CUTTER		1010301008						
124	Gunting Besar/Kecil/Sedang	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
125	Cutter Besar (L-500)	000002	16	Buah	16	Buah	Baik	-
126	Gunting 330 (sedang)	000003	20	Buah	20	Buah	Baik	-
127	Gunting 340 (besar)	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
128	Cutter A-300	000005	27	Buah	27	Buah	Baik	-
129	Serutan pensil	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
130	isi cutter A-300	000007	19	Pad	19	Pad	Baik	-
131	Serutan meja pensil	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
PITA MESIN KETAK		1010301009						
132	Pita Mesin Ketik IBM	000001	12	Buah	12	Buah	Baik	-
133	Pita Mesin Ketik Manual	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
134	Pita mesin ketik Royal	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
ALAT PEREKAT		1010401010						
135	Lem kertas	000001	0	Botol	0	Botol	-	-
136	Lem Indukel	000002	0	Botol	0	Botol	-	-
137	Lem Glue	000003	3	Botol	3	Botol	Baik	-
138	Double Solabip	000005	10	Buah	10	Buah	Baik	-
139	Singel Solabip	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
140	Lem bentang	000007	0	Kaleng	0	Kaleng	-	-
141	Lem (poly cair)	000008	0	Buah	0	Kaleng	-	-
142	Lem (poly cair)	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
143	Lem glue stick	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
144	Dapenser tape	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
145	Page marker assorted 3M	000012	0	Pad	0	Pad	-	-
146	Post it sign here 3M	000013	29	Pad	29	Pad	Baik	-
147	Scratch tape magic	000014	9	Pad	9	Pad	Baik	-
148	Post it note tape flag 3M	000015	30	Pad	30	Pad	Baik	-
149	Post it tape flag warna warna	000016	18	pad	18	pad	Baik	-
150	Post it 634 Warna	000017	0	Pad	0	Pad	-	-
151	Double selfstic 3M	000018	0	Pad	0	Pad	-	-
STADLER HD		1010301011						
152	Stadler HD 10 Max	000001	33	Buah	33	Buah	Baik	-

152	Stapler HD 50 Max	000002	34	Buah	34	Buah	Baik	-
154	Stapler Remover	000003	18	Buah	18	Buah	Baik	-
	STAPLES	1010901011						
145	Staples HD 12 N/24	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
	ISI STAPLES	1010901012						
156	ISI Staples 1213 Max	000001	28	Kotak	28	Kotak	Baik	-
157	ISI Staples 1210 Max	000002	19	Kotak	19	Kotak	Baik	-
	BARANG CETAKAN	1010902008						
158	Buku Peran aktif hakim dim perkara Perdata	000001	0	Buku	0	Buku	-	-
159	Buku Permulaan Peradilan	000005	0	Buku	0	Buku	-	-
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA	1010901099						
160	Stapler Rppr	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
161	ISI Stapler No. 2-1 M	000003	438	Kotak	535	Kotak	Baik	-
162	ISI Stapler No. 10-1M	000003	226	Kotak	226	Kotak	Baik	-
163	ISI Stapler No. 5/16"	000004	20	Kotak	20	Kotak	Baik	-
164	ISI Staples No. 5/8"	000005	24	Kotak	24	Kotak	Baik	-
165	ISI Cutter Besar	000006	103	Kotak	103	Kotak	Baik	-
166	Kalulator Casio	000007	2	Buah	2	Buah	Baik	-
167	Clipboard Plastik	000008	6	Buah	6	Buah	Baik	-
168	Paper Tray	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
169	Desk Organizer	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
170	Data bag nylon 305	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
171	Papan whiteboard	000012	0	Buah	0	Buah	-	-
172	Pembolong No. 858 Rembo	000013	6	Buah	6	Buah	Baik	-
173	Papan Whiteboard 45x60	000014	0	Buah	0	Buah	-	-
174	Penko numbering	000015	0	Buah	0	Buah	-	-
175	Tan Rakor	000016	0	Buah	0	Buah	-	-
176	Kantong Pensil clipboard Plastik	000017	0	Buah	0	Buah	-	-
		1010902001						
177	Kertas HV570 gram A4	000001	158	Rim	158	Rim	Baik	-
178	Kertas HV5 70 gram F4	000002	229	Rim	229	Rim	Baik	-
179	Kertas HV5 80 gram A4	000003	0	Rim	0	Rim	-	-
180	Kertas HV5 A3	000004	1	Rim	1	Rim	Baik	-
	BERBAGAI KERTAS	1010902002						
181	Kertas Fax	000001	7	Roll	7	Roll	Baik	-
182	Kertas Lembar Diaposa	000002	0	Buku	0	Buku	-	-
183	Kertas memo kecil	000003	18	Buku	18	Buku	Baik	-
184	Kertas memo besar	000004	8	Buku	8	Buku	-	-
185	Kartu Peradilan	000005	300	Lembar	300	Lembar	Baik	-
186	Kartu Berobat	000006	0	Lembar	0	Lembar	-	-
187	Post it 654	000007	40	Pad	40	Pad	Baik	-
188	Label 5/1 A4	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
189	Box amp/kardus	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
190	Kertas label Termajerry	000010	347	Pak	347	Pak	Baik	-
191	Glossy photo paper	000011	5	Pak	5	Pak	Baik	-
192	Glossy photo sticker	000012	1	Pak	1	Pak	-	-
193	Tisu Kotak	000013	0	Kotak	0	Kotak	-	-
194	Tisu Roll	000014	0	Roll	0	Roll	-	-
	KERTAS COVER	1010902003						
195	Sampul Kertas belah ketupat	000001	0	Lembar	0	Lembar	-	-
196	Kertas Film F4	000002	0	Lembar	0	Lembar	-	-
197	Kertas Cover	000003	1138	Lembar	1138	Lembar	Baik	-
198	Kertas Cover F4	000004	0	Lembar	0	Lembar	-	-
199	Kertas Cover A4	000005	0	Lembar	0	Lembar	-	-
	AMPLOP	1010902004						
200	Amplop Dinas kecil	000001	3094	Lembar	3094	Lembar	Baik	-
201	Amplop Putih No. 110	000002	117	Pak	117	Pak	Baik	-
202	Amplop Putih No.90	000003	24	Pak	24	Pak	Baik	-
203	Amplop dinas besar	000004	196	Lembar	196	Lembar	Baik	-
204	Amplop Dinas bertelinga	000005	0	Lembar	0	Lembar	-	-
	KOP SURAT	1010902005						
205	Kop Garuda Tengah Polos	000001	1	Rim	1	Rim	Baik	-
206	Kertas Kop surat Tugas	000002	0	Rim	0	Rim	-	-
207	Kertas Kop Surat	000003	0	Rim	0	Rim	-	-
208	Lembar diaposa	000004	0	Rim	0	Rim	-	-
209	Kop Surat MATH	000005	8	Rim	8	Rim	Baik	-
210	Kop ST lembil	000006	20	Rim	10	Rim	Baik	-
211	Kop logo Garuda coveror	000007	4	Rim	4	Rim	Baik	-

212	Kop Garuda Converter	000008	1	Rim	1	Rim	Baik	-
KERTAS DAN COVER LAINNYA		1010301009						
213	Kertas pemroses A4	000001	0	Rim	0	Rim	-	-
214	Kampul plastik	000002	1720	Lembar	1725	Lembar	Baik	-
215	Pembatas kertas warna-warni	000003	7	Rim	7	Rim	Baik	-
TINTA CETAK		1010302002						
216	Tinta Print Laser Jet 7560A	000001	0	buah	0	buah	-	-
217	Tinta Print Laser Jet 7561A	000002	0	buah	0	buah	-	-
218	Tinta Print Laser Jet 7562A	000003	0	buah	0	buah	-	-
219	Tinta Print Laser Jet 7563A	000004	0	buah	0	buah	-	-
220	Tinta Stampet	000005	0	buah	0	buah	-	-
221	Tinta Canon 35	000006	16	buah	16	buah	Baik	-
222	Tinta Canon 35	000007	62	buah	62	buah	Baik	-
223	Karbon mesin fax	000008	0	buah	0	buah	-	-
224	Karbon mesin fax Panasonic	000009	6	buah	6	buah	Baik	-
PLAY CETAK		1010303009						
225	huruf akrilik	000001	0	buah	0	buah	-	-
226	Bachdrop	000002	0	buah	0	buah	-	-
BAHAN CETAK LAINNYA		1010303999						
227	Lakban Hitam Besar	000001	23	buah	23	buah	Baik	-
228	Bantalan Stempel	000002	7	buah	7	buah	Baik	-
229	Lakban Kecil	000003	36	buah	36	buah	Baik	-
230	Lakban Sedang	000004	17	buah	17	buah	Baik	-
231	Lakban Besar	000005	0	buah	0	buah	Baik	-
232	Lakban Coklat	000007	3	buah	3	buah	Baik	-
233	Calceape	000009	3	buah	3	buah	-	-
234	Lem Alkon	000008	0	buah	0	buah	-	-
235	Clumping Besar	000009	0	buah	0	buah	-	-
CONTINUOUS TONER								
236	Kertas continuous form 9 L/1x1 PLY	000001	0	box	0	box	-	-
PITA PRINTER								
237	Pita Epson LQ 2180	000001	0	buah	0	buah	-	-
TINTA/TONER PRINTER		1010304004						
238	Tinta 94 (black)	000001	0	buah	0	buah	-	-
239	Tinta 95 (Color)	000002	3	buah	3	buah	Baik	-
240	Toner HP 13 A	000003	27	buah	27	buah	Baik	-
241	Tinta HP DesignJet T95	000004	0	buah	0	buah	-	-
242	Tinta Printer HP LaserJet 2700	000005	0	buah	0	buah	-	-
243	Tinta HP DesignJet T91	000006	0	buah	0	buah	-	-
244	Tinta Printer LaserJet 7560A	000007	0	buah	0	buah	-	-
245	Tinta Printer LaserJet 7561A	000008	0	buah	0	buah	-	-
246	Tinta Printer LaserJet 7562A	000009	0	buah	0	buah	-	-
247	Tinta Printer LaserJet 7563A	000010	0	buah	0	buah	-	-
248	Tinta HP 57	000011	0	buah	0	buah	-	-
249	Tinta HP 56	000012	0	buah	0	buah	-	-
250	Tinta Canon F1W 3	000013	0	buah	0	buah	-	-
251	Toner HP 85 A	000014	19	buah	19	buah	-	-
252	Tinta Epson L800 Hitam	000015	29	buah	29	buah	Baik	-
253	Tinta HP F5015	000016	0	buah	0	buah	-	-
254	Tinta Xerox Phaser 3428	000017	0	buah	0	buah	-	-
255	Gara Print Hitam (canon 1600)	000018	0	buah	0	buah	-	-
256	Gara Print Warna (canon 1600)	000019	0	buah	0	buah	-	-
257	Toner HP 13 G Rafl	000020	0	buah	0	buah	-	-
258	Toner HP 85 A Rafl	000021	0	buah	0	buah	-	-
259	Tinta Epson L800 Magenta	000022	34	buah	34	buah	Baik	-
260	Tinta Epson L800 Yellow	000023	38	buah	38	buah	Baik	-
261	Tinta Epson L800 Cyan	000024	18	buah	18	buah	Baik	-
262	Tinta Epson L800 Light Cyan	000025	29	buah	29	buah	Baik	-
263	Tinta Epson L800 Light Magenta	000026	42	buah	42	buah	Baik	-
264	Tinta HP 90 (Black)	000027	1	buah	1	buah	Baik	-
265	Tinta Brother Black	000028	1	buah	1	buah	Baik	-
266	Tinta Brother Cyan	000029	1	buah	1	buah	Baik	-
267	Tinta Brother Magenta	000030	1	buah	1	buah	Baik	-
268	Tinta Brother Yellow	000031	1	buah	1	buah	Baik	-
269	Toner HP 50A	000032	1	buah	1	buah	-	-
270	Toner Xerox warna	000033	0	buah	0	buah	-	-
271	Toner Xerox Hitam P115W	000034	19	buah	19	buah	Baik	-
272	Tinta HP 62 Hitam	000035	19	buah	19	buah	-	-

273	Tinta HP 62 Warna	000036	28	Buah	28	Buah	-	-
	DISKET	1010304005						
274	Sony CD RW 700 MB	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
275	Sony Recording AFPC	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
276	DVD Verbatim	000003	0	Keping	0	Keping	-	-
	USB/FLASH DISK	1010304006						
277	USB 2 GB	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
278	Flash disk 4 GB	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
279	Flash Disk 2 GB	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
280	Flash Disk 8 GB	000004	16	Buah	16	Buah	Baik	-
281	Flashdisk 32 GB	000005	10	Buah	10	Buah	Baik	-
282	USB Hub	000006	3	Buah	3	Buah	Baik	-
283	Name Tag Flashdisk	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
	MOUSE							
284	Mouse wireless	000001	23	Buah	23	Buah	Baik	-
	CD/DVD							
285	CD Raker	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
286	DVD RW	000002	4	Buah	4	Buah	Baik	-
	BAHAN KOMPUTER LAINNYA	1010305000						
287	Kabel Data	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
288	Mouse Pad	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
289	Kabel Power	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
290	Kabel HDMI	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
291	Hardisk Eksternal	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
292	Mouse	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
293	Cooler master notebook	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
	115113							
	SAPU DAN SIKAT	1010305001						
294	Sikat Cuci	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
295	Sampung	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
296	Sikat Toilet	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
297	Sapu ijuk	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
	ALAT-ALAT PEL DAN LAP	1010305002						
298	Wiper Lantai	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
299	Kain Serbet	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
300	Handuk	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
301	Tisu Katak	000004	0	Kotak	0	Kotak	-	-
302	Tissue Roll	000005	0	Roll	0	Roll	-	-
303	Kain Pel Batang	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
304	Pembiat Lantai Panjang	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
305	wiper kaca	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
	EMBER, SLANG, DAN TEMPAT AIR LAINNYA	1010305003						
306	Ember Besar	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
307	Ember Sedang	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
308	Samping	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
	KESEY DAN TEMPAT SAMPAH	1010305004						
309	Karpet Raket	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
310	Dust Cotton Mat	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
311	Handuk Kese	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
312	Tempat Sampah tutup	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
313	Kese	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
	ALAT PENGIKAT	1010305005						
314	Tali Rami	000001	18	Roll	18	Roll	Baik	-
315	Tali Rafia	000002	2	Roll	2	Roll	-	-
	BAHAN KOMBA LINTAS PEMBERSIH	1010305006						
316	Pewangi Lantai	000001	0	Botol	0	Botol	-	-
317	Sabun cuci	000002	0	Pak	0	Pak	-	-
318	Porslin pembersih	000003	0	Botol	0	Botol	-	-
319	Hand Soap	000004	0	Botol	0	Botol	-	-
320	Pembersih Kaca	000005	0	Botol	0	Botol	-	-
321	Ranetok	000006	0	Botol	0	Botol	-	-
322	Pembersih lantai	000007	0	Botol	0	Botol	-	-
323	tu Aerosol	000008	0	Botol	0	Botol	-	-
324	Sabun cuci Sunlight Botol	000009	0	Botol	0	Botol	-	-
325	Sabun Cuci Sunlit biasa	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
326	Handycap	000011	0	Buah	0	Buah	-	-

327	Sabun Mandi	000012	0	Barel	0	Barel	-	-
328	Sampot Nyamuk	000013	0	Barel	0	Barel	-	-
329	Kampar	000014	0	Pack	0	Pack	-	-
330	Pembersih Furniture	000015	0	Pack	0	Pack	-	-
331	Kerbal	000016	0	Pack	0	Pack	-	-
332	ALAT UNTUK MAKAN DAN MINUM	1010306000						
333	Nampan	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
334	Pisau Buah	000002	0	Lusin	0	Lusin	-	-
335	Sendok Garpu	000003	0	Lusin	0	Lusin	-	-
336	Sendok Sayer	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
337	Gelas Kaca Gede	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
338	Piring Sanga	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
339	Piring	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
340	Mangkuk	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
341	Cangkir Sanga	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
342	Cangkir Set	000012	0	Buah	0	Buah	-	-
343	Sendok makan	000013	0	Lusin	0	Lusin	-	-
344	PENGHARUM RUMAH	1010306002						
345	Kapur Barus	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
346	Pewangi gantung	000002	0	Bungkus	0	Bungkus	-	-
347	By fresh	000003	0	Barel	0	Barel	-	-
348	Mesin Aerosol/Pewangi Glade	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
349	Carfresh	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
350	Tesler Bot	000006	0	Bungkus	0	Bungkus	-	-
351	Mesin pengharum ruangan	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
352	Pengharum atas meja	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
353	Wax Refill Glade	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
354	PERANGI BANTOR LAINNYA	1010306000						
355	Spoons Cuci piring	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
356	Kevleba	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
357	Kain kaca	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
358	Obeng	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
359	Trolol Kecil	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
360	Trolol Besar	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
361	KABEL LISTRIK	1010306001						
362	Kabel NYM 2x2,5 50 M	000001	0	Roll	0	Roll	-	-
363	Kabel Roll	000002	4	Buah	4	Buah	-	-
364	Kabel NYM 3x1,5 50M	000003	0	Roll	0	Roll	-	-
365	Kabel NYM 3x2,5 50 M	000004	0	Roll	0	Roll	-	-
366	Kabel NYM HY 2x0,75 50M	000005	0	Roll	0	Roll	-	-
367	LAMPU LISTRIK	1010306002						
368	Lampu Philips 22 Watt	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
369	Lampu Philip 36 Watt	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
370	STOP KONTAK	1010306003						
371	Kabel Colokan 5 M	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
372	SAKLAR	1010306004						
373	Saklar 4 lubang	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
374	Saklar 3 lubang	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
375	Saklar 2 lubang	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
376	Balast	1010306006						
377	Balast	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
378	BATU BATERAI	1010306010						
379	Baterai Alkalin (AA)	000001	60	set	60	set	Balk	-
380	Batu Baterai Alkalin (AAA)	000002	75	set	75	set	Balk	-
381	Battery kotak 9 volt	000003	13	Buah	13	Buah	Balk	-
382	ALAT LISTRIK LAINNYA	1010306009						
383	Rumah lampu Down light	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
384	ATRIBUT	1010407004						
385	Kartu Perenta & Tail	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
386	ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	1010309000						
387	Buku Agenda Rakor	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
388	Item Tag	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
389	Tas Laptop Predator Carbenz 14"	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
390	Tas Laptop Prodigy Carbenz RC 14"	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
391	Tas Laptop Lucerne LT + RC Carbenz 14"	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
392	Tas Laptop Incode Carbenz 14"	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
393	Tas Pemeliharaan	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
394	Koper Pemberkasan Pemeliharaan	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
395	Koper Pemberkasan Pemeliharaan I	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
396	Materai 3000	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
397	Materai 6000	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
398	OBAT CAIR	115128						
399	Obat Nyamuk	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
400	BARANG PERSEDIAAN	1010501008						
401	Tas Sosialisasi	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
402	Tas Jinjing Sosialisasi	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
403	Buku Manajemen Pengawasan	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
404	Buku Himpunan Peraturan Perundang	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
405	Buku Pertukaran Peradilan Beruas	000005	0	Buah	0	Buah	-	-

C. Pengelolaan Keuangan

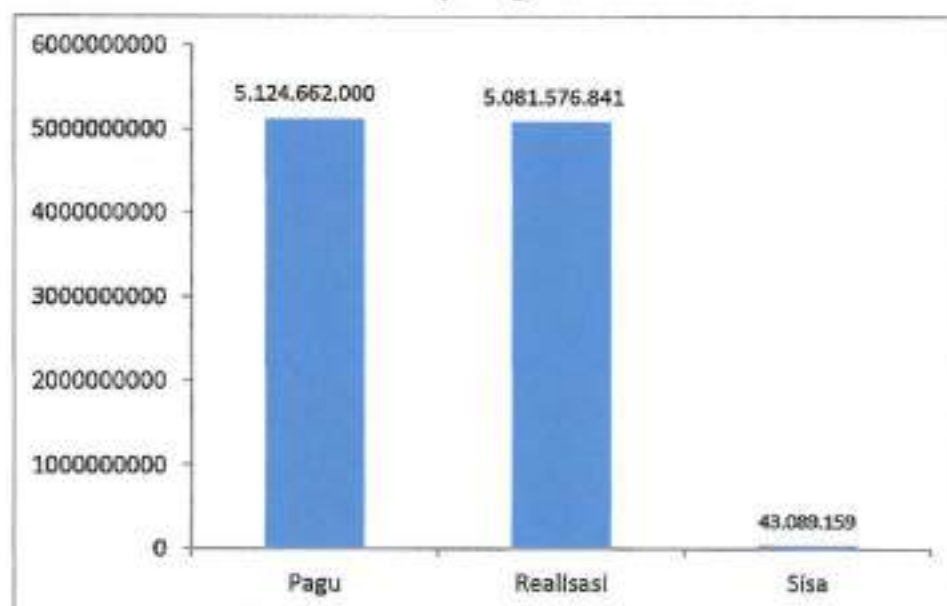
Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengelola 1 (satu) DIPA Nomor : SP DIPA-005.07.1.663136/2018 Tanggal 5 Desember 2017 dengan jumlah PAGU (REVISI KE-2 tanggal 19 November 2018) sebesar Rp.33.944.916.000,- terdiri dari:

1. BELANJA PEGAWAI

Pengelolaan belanja pegawai tahun anggaran 2018 yaitu:

- a. **Pagu** : **Rp.5.124.662.000,-**
(lima milyar seratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- b. **Realisasi** : **Rp. 5.081.576.841,- (99,16%)**
(lima milyar delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah)
- c. **Sisa** : **Rp.43.085.159,- (0,84%)**
(empat puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah)

Grafik 3.3 Belanja Pegawai Tahun 2018

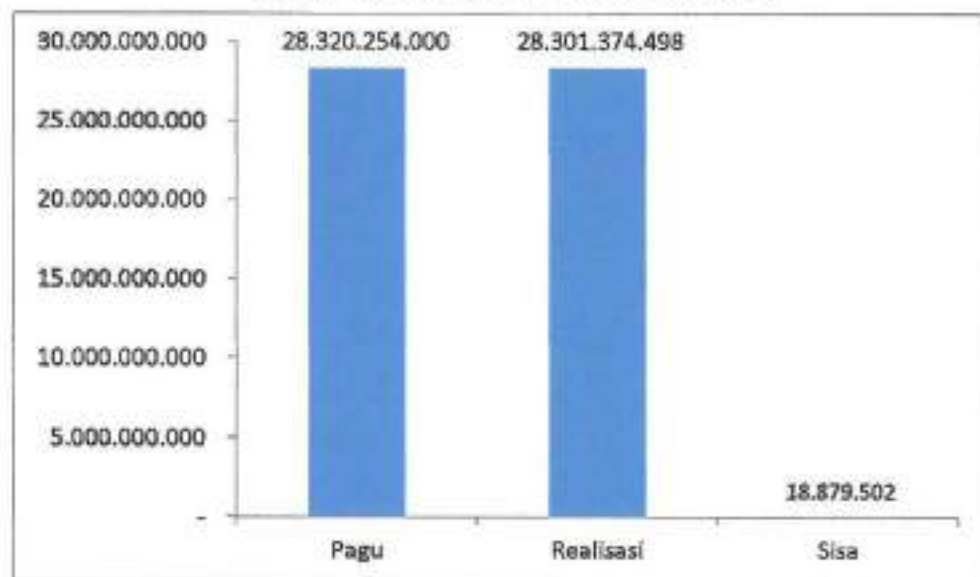


2. BELANJA BARANG

Pengelolaan belanja barang tahun anggaran 2018 yaitu:

- a. **Pagu** : **Rp.28.320.254.000,-**
(dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)
- b. **Realisasi:** **Rp. 28.301.374.498,- (99,93%)**
(dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
- c. **Sisa** : **Rp. 18.879.502,- (0,07%)**
(dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)

Grafik 3.4 Belanja Barang Tahun 2018

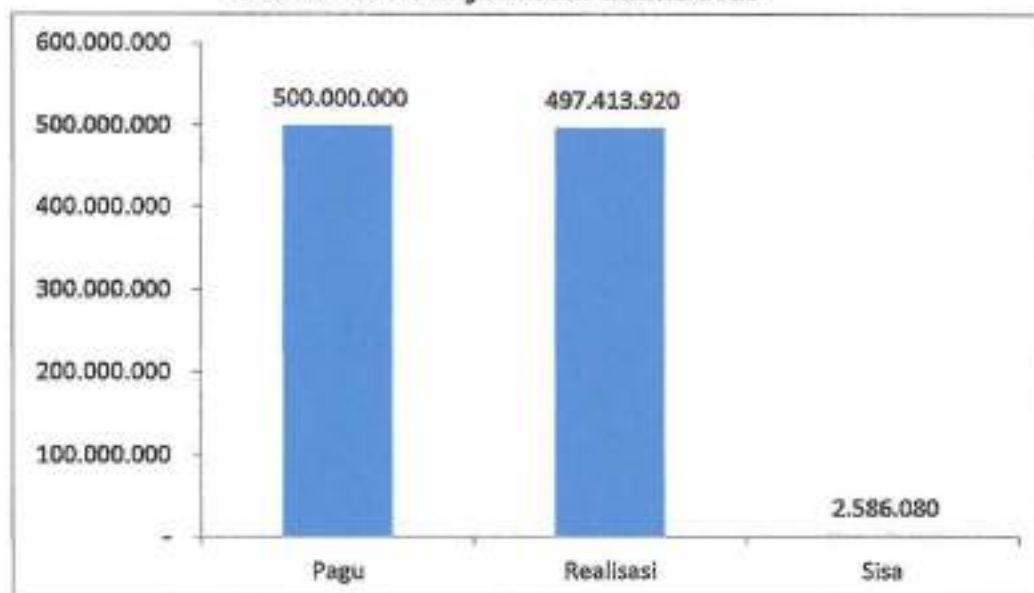


3. BELANJA MODAL

Pengelolaan belanja modal tahun anggaran 2018 yaitu:

- a. **Pagu** : **Rp.500.000.000,-**
(lima ratus juta rupiah)
- b. **Realisasi:** **Rp.497.413.920,- (99,48%)**
(empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)
- c. **Sisa** : **Rp.2.568.080,- (0,52%)**
(dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh rupiah)

Grafik 3.5 Belanja Modal Tahun 2018



Tabel 3.36 Data Per Output & Satuan Belanja TA 2018

Sesuai DIPA Nomor : SP DIPA-005.07.1.663136/2018 Tanggal 5 Desember 2017

		Pagu Revisi	Realisasi	Sisa
Inspektur Wilayah I (1077)	Pemeriksaan Kasus	1.461.066.000	1.460.802.424	263.576
	Pemeriksaan Reguler	1.540.629.000	1.540.621.644	7.356
	Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	977.117.000	977.087.284	29.716
	Audit Barang dan Jasa	79.437.000	79.436.250	750
	Pemeriksaan Keuangan	143.925.000	143.916.550	8.450
	Audit Manajemen Kepegawaian	40.046.000	40.006.250	39.750
	Evaluasi LKJIP	35.004.000	35.001.050	2.950
	Reviu RKAKL	31.566.000	31.530.150	35.850
	Monitoring	118.333.000	118.328.750	4.250
	Analisa Kebijakan Pengawasan	30.513.000	30.461.250	51.750
	Inspektur Wilayah II (1078)	Pemeriksaan Kasus	1.485.638.000	1.485.614.188
Pemeriksaan Reguler		1.753.477.000	1.753.474.906	2.094
Pemeriksaan Kinerja dan Integritas		877.177.000	877.176.120	880

	Audit Barang dan Jasa	40.013.000	40.011.770	1.230
	Audit Manajemen Kepegawaian	32.390.000	32.355.750	34.250
	Pemeriksaan Keuangan	65.368.000	65.368.000	0
	Reviu LK	150.484.000	150.483.600	400
	Evaluasi LKJiP	31.100.000	31.099.750	250
	Reviu RKA-KL dan Reviu RKBMN	34.855.000	34.816.350	38.650
	Monitoring	80.751.000	80.749.750	1.250
	Analisa Kebijakan Pengawasan	27.675.000	27.595.000	80.000
Inspektur Wilayah III (5258)	Pemeriksaan Kasus	1.386.742.000	1.386.652.150	89.850
	Pemeriksaan Reguler	1.207.058.000	1.207.054.635	3.365
	Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	937.369.000	937.365.100	3.900
	Audit Barang dan Jasa	103.754.000	103.729.350	24.650
	Pemeriksaan Keuangan	73.599.000	73.597.850	1.150
	Evaluasi LKJiP	40.274.000	40.273.750	250
	Audit Manajemen Kepegawaian	47.969.000	47.918.750	50.250
	Reviu RKA-KL	40.500.000	40.465.750	34.250
	Monitoring	105.343.000	105.341.350	1.650
	Analisa Kebijakan Pengawasan	26.550.000	26.545.000	5.000
Inspektur Wilayah IV (5259)	Pemeriksaan Kasus	1.023.920.000	1.023.914.050	5.950
	Pemeriksaan Reguler	988.780.000	988.739.840	40.160
	Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	664.819.000	664.813.150	5.850
	Audit Barang dan Jasa	115.425.000	115.423.750	1.250
	Pemeriksaan Keuangan	79.469.000	79.466.150	2.850
	Evaluasi LKJiP	34.605.000	34.566.550	38.450
	Audit Manajemen Kepegawaian	48.535.000	48.480.650	54.350

Dokungan Manajemen (1079)	Reviu RKA-KL	39.425.000	39.387.350	37.650
	Monitoring	132.971.000	132.941.450	29.550
	Analisa Kebijakan Pengawasan	25.595.000	25.595.000	0
	Penyempurnaan Handbook Hakim Pengawas	300.000.000	299.999.669	331
	Penyusunan Rencana Program	261.033.000	261.031.710	1.290
	Pengelolaan Keuangan	194.130.000	194.118.120	11.880
	Pengelolaan Perbendaharaan	522.902.000	522.843.370	58.630
	Pengelolaan Kepegawaian	1.187.436.000	1.187.356.227	79.773
	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	296.233.000	296.226.850	6.150
	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	443.313.000	443.310.320	2.680
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	5.455.941.000	5.455.420.174	520.826
	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	263.204.000	262.137.920	1.066.080
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	236.796.000	235.276.000	1.520.000
	Gaji dan Tunjangan	5.124.662.000	5.081.576.841	43.085.159
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.500.000.000	3.499.283.814	716.186

➤ Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.944.916.000 digunakan untuk kegiatan :

- Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp 5.124.662.000
- Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) sebesar Rp 3.500.000.000
- Belanja barang non operasional (biaya perjalanan dinas, pembinaan, tindaklanjut pengaduan dan Reviu RKAKL) sebesar Rp 24.820.254.000

- Belanja modal (pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana kerja) sebesar Rp 500.000.000

➤ **Perkembangan Alokasi Anggaran Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**

Dalam rangka perkembangan penanganan pengaduan setiap tahunnya, maka diperlukan perkembangan personel Badan Pengawasan. Sehingga diperlukan perkembangan alokasi anggaran setiap tahunnya, berikut perkembangan alokasi anggaran dalam kurun waktu 3 tahun terakhir :

Tabel 3.37 Perkembangan Alokasi Anggaran Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

No	Unit	Tahun Anggaran APBN		
		2016	2017	2018
1	Badan Pengawasan	31.400.000.000	31.400.000.000	33.944.916.000

D. Regulasi Tahun 2018

Badan Pengawasan sebagai APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas sepanjang tahun 2018 Badan Pengawasan telah melakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Kegiatan *Assurance* meliputi Pemeriksaan Kinerja dan Integritas, Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Reviu Laporan *Keuangan*, Reviu RKAKL, Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal.
2. Kegiatan *Consulting* meliputi : Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan, *Consulting* dalam rangka Peningkatan Pengawasan dan *Quality Assurance*

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, Badan Pengawasan pada tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Inspeksi Mendadak (SIDAK)

Dalam menjaga eksistensi tertib administrasi dan kedisiplinan, maka pada tahun 2018 telah dilakukan kegiatan inspeksi mendadak yang meliputi: PT & PTA Pekanbaru, PTUN Tanjung Pinang, PA Lubuk Basung, PN Sigli, PN Kuala Tungkal, PTUN Jakarta, Dilmil III-12 Surabaya, PN Klaten, PN Surabaya, PT Pontianak, PTA Pontianak, PTUN Pontianak, PTUN & PN Banjarmasin, PT & PTA Banjarmasin, Dilmil Banjarmasin, PA Tanjung, PN Mamuju, PTUN Kendari, PTUN Palangkaraya, PTA Jayapura, PA Jayapura, PTUN Jayapura, PT Palu, PTA Palu, PTUN Palu, Wilayah NTT, PT Mataram, PTA Mataram, PTUN Mataram. Pelaksanaan inspeksi mendadak dipimpin oleh Ketua Tim Pemeriksa, Sekretaris Tim dan Anggota.

2. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Pada tahun 2018 Badan Pengawasan melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas pada 100 Satker secara tematik berfokus pada pengelolaan keuangan perkara, pengelolaan PNPB yang berasal dari pelayanan perkara dan pelayanan publik.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 57 satker. Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 30 satker. Di Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 7 satker dan di Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 6 satker.

3. Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan audit Pengadaan Barang dan Jasa merupakan upaya untuk menjaga akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa, menguji dan mengetahui sejauhmana kepatuhan terhadap peraturan/ketentuan yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga prinsip ekonomis, efisien ,efektif dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa dapat dicapai.

Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 5 satker, Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 4 satker, dan Di Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I,II,III, IV berjumlah 1 satker.

BAB IV PENGAWASAN

A. Program Pembaharuan

1. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) MARI Versi 3.0

Aplikasi Siwas dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi serta permasalahan yang timbul dan penyempurnaan bisnis proses pada aplikasi Siwas versi sebelumnya (versi 2.0), selain itu diperlukan revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, sehingga ada kesesuaian antara aplikasi Siwas dengan SOP Siwas dan petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah No. 09 tahun 2016.

Tujuan revisi / pengembangan Siwas Versi 3.0 sebagai berikut :



Batasan dan ruang lingkup dalam pengembangan Aplikasi SIWAS dan perubahan terhadap Aplikasi SIWAS meliputi :

No	PENGEMBANGAN DAN PERBAIKAN
1	Tampilan aplikasi secara mobile device (Smartphone, Tablet, Laptop) pada seluruh proses bisnis.
2	Perbaikan fungsi login yang tidak keluar secara otomatis
3	Perbaikan susunan urutan data pengaduan berdasarkan tanggal masuk
4	Perbaikan Laporan Hasil Pemeriksaan yang sudah selesai diperiksa.
5	Perbaikan status terkait yang secara otomatis berubah menjadi terlapor setelah tahapan input Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Akun Sekertaris Tim hanya sampai tahapan input Laporan Hasil Pemeriksaan.
7	Akun Kasubag TU. Irwil memiliki fasilitas sama dengan Irwil, namun hanya melihat saja tanpa bisa mengubah.

8	Akun Sekretaris Bawas memiliki fasilitas sama dengan Kabawas, namun hanya bisa melihat tanpa bisa mengubah.
9	Perbaikan salah penempatan pengaduan antar wilayah
10	Penambahan kolom pada disposisi Kabawas, untuk menu disposisi tidak hanya telah namun mengikuti isi disposisi Kabawas (Misal : tunjuk Irwil, gabung berkas, arsipkan, dll).
11	Perubahan alur inisiatif sendiri dirubah menjadi : Pengaduan inisiatif sendiri masuk → Disposisi Kabawas → Irwil menunjuk Penelaah → Telaah → Persetujuan Inisiatif Sendiri Akun Ketua Pengadilan Tingkat Banding
12	Penambahan template Konfirmasi dan Klarifikasi untuk akun Irwil.
13	Penambahan akun staf Kasubag. TU. Irwil dalam hal konsep surat
14	Penambahan menu Disposisi Kabawas berupa telaah, arsipkan, gabung berkas, pantau, dll
15	Penambahan menu pantau untuk melaporkan hasil pemantauan kepada Kabawas.
16	Penambahan peraturan yang dilanggar pada terlapor.
17	Perbaikan tab koreksi hasil telaah khusus akun kabawas dan akun Inspektur Wilayah
18	Penghitungan otomatis apabila 14 hari kerja sejak tanggal pengiriman kofirmasi pengaduan ditutup, jika ada jawaban dibuka kembali oleh kabawas, bentuk tim pemeriksa.
19	Perbaikan dashboard untuk penghitungan statistik jumlah pengaduan berdasarkan peradilan, pengaduan tidak dilanjutkan (dijawab dengan surat), pengaduan yang ditindaklanjuti dengan kriteria dijatuhi sanksi dengan macam sanksinya dan jenis pengaduannya.
20	Pemisahan jenis tindaklanjut pengaduan (pengaduan diarsipkan/gabung berkas dibuat terpisah)
21	Penambahan fungsi akun kabawas untuk menelaah pengaduan tanpa melalui proses disposisi (terkait penghitungan jumlah dan waktu proses).
22	Perbaikan laporan pada menu laporan whistleblower
23	Penambahan kolom Irwil pada whistle_telaah
24	Penambahan fungsi audit/audiwan selain penelaah dan berfungsi sebagai sekretaris tim

No	PENAMBAHAN FITUR
1	Pencabutan Laporan Pengaduan bagi pelapor
2	Tambah tombol hapus (bila terjadi kesalahan input pengaduan) khusus meja pengaduan bawas
3	Penambahan menu dashboard buat penelaah untuk penghitungan jumlah telaah yang sudah selesai
4	Penambahan notifikasi pop up adanya tugas baru pada saat login khusus buat Penelaah
5	Penambahan notifikasi terkait pengaduan yang ditangani setiap user yang terkait pengaduan
6	Penambahan fitur mencari kemiripan data sejak penggabungan berkas awal

	(untuk pro agno)
7	Penambahan fitur cetak pengaduan dan cetak telaah khusus untuk Kasubag. TU Irwil
8	Penambahan fitur pemilihan irwil sesuai dengan nomor perkara yang diadukan
9	Penambahan menu gratifikasi
10	Penambahan menu benturan kepentingan

Tampilan Siwas versi 3.0 antara lain dapat diuraikan sebagai berikut

1) Tampilan Siwas versi mobile

Gambar antarmuka pengembangan SIWAS Versi 3 dirubah menyeluruh secara responsive yang artinya aplikasi Siwas dapat dibuka di berbagai device (Smartphone, Tablet, maupun Desktop) serta Siwas dapat di install di Smartphone berbasis android.



Gambar 4.1 Aplikasi Siwas Versi 3.0 Pada Handphone Android

2) Tampilan Siwas versi Desktop



Gambar 4.2 Aplikasi Siwas Versi 3.0 pada Komputer Desktop

3) Tampilan baru antar muka *POP-UP* (*Grafik User Interface POP-UP*)



GAMBAR 4.4 – TAMPILAN *POP-UP*

4) Tampilan fitur pengaduan dicabut pada akun Pelaporan



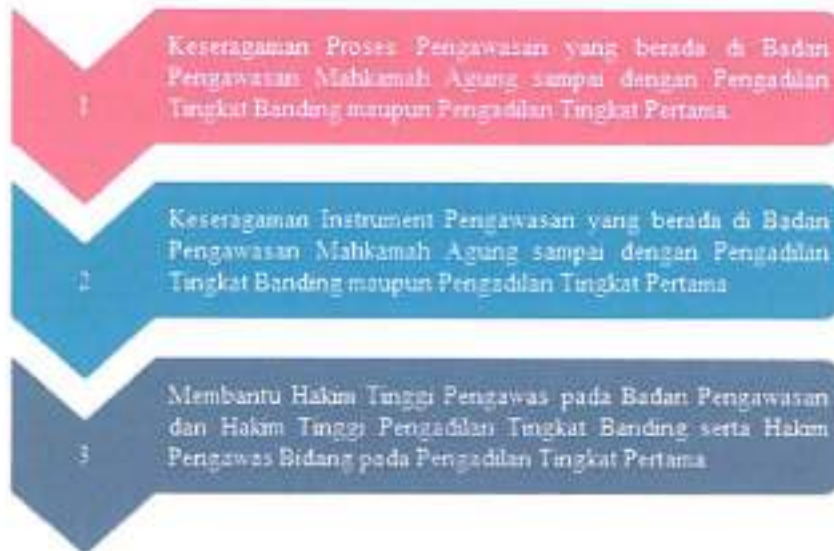
Gambar 4.5 Tampilan fitur pengaduan dicabut

2. Pembangunan Aplikasi E-Monitoring Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan

Badan-Badan Peradilan, maka Badan Pengawasan membangun aplikasi untuk memantau dan melaporkan hasil pelaksanaan Pengawasan yang disebut *e-monitoring* pengawasan.

Tujuan Pembangunan Aplikasi E-Monitoring Pengawasan untuk :



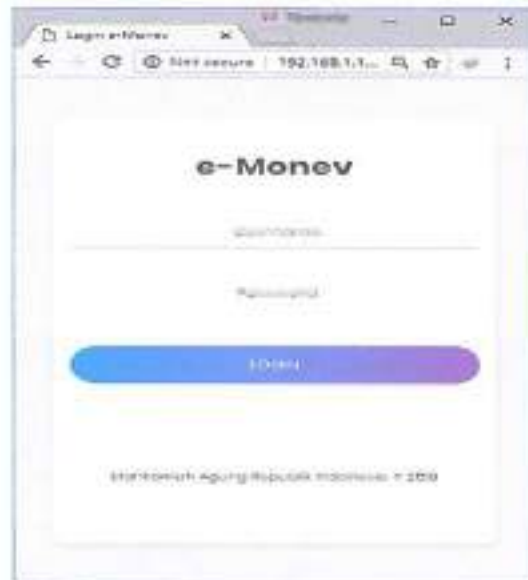
Tampilan Aplikasi E-Monitoring Pengawasan sebagai berikut :

a. Tampilan Halaman Utama Desktop



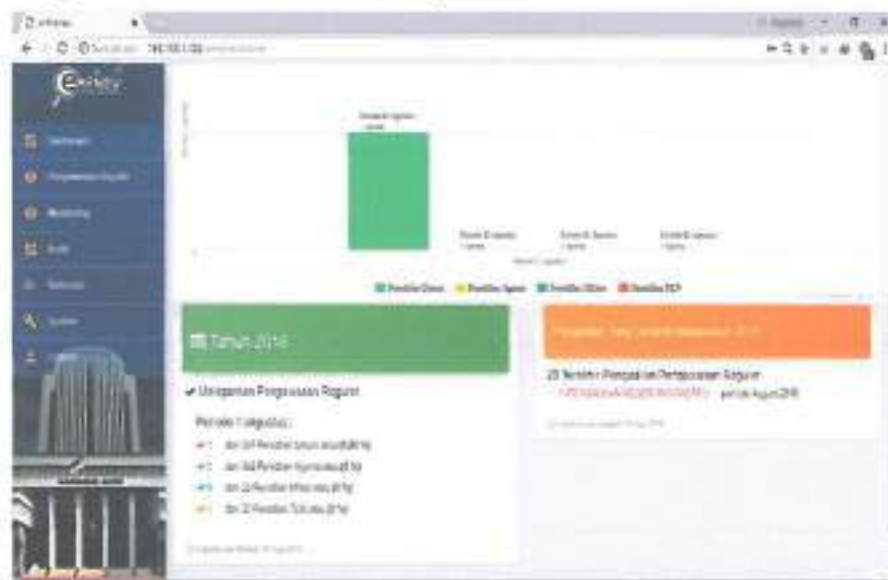
Gambar 4.6 Tampilan Halaman Utama Login Aplikasi E-Monitoring Pengawasan pada Komputer Desktop

b. Tampilan Form Login Mobile (Smartphone/Tablet)



Gambar 4.7 Tampilan Form Login Mobile

c. Tampilan Halaman Utama Desktop



Gambar 4.8 Tampilan Halaman Utama Desktop

d. Tampilan Halaman Utama Mobile



Gambar 4.9 Halaman Utama Mobile

e. Tampilan Halaman instrument untuk menjawab pertanyaan



Gambar 4.10 Tampilan Menjawab Pertanyaan

- Jika jawaban *YA*, maka pertanyaan akan otomatis tersimpan, dan kembali kehalaman instrument/pertanyaan
- Jika jawaban *TIDAK*, maka akan muncul form temuan dengan kolom Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, dan Rekomendasi serta menu untuk upload file bukti temuan.

f. Tampilan Halaman pilihan TIDAK / Terdapat Temuan Kolom Kondisi



Gambar 4.11 Tampilan Kolom Kondisi

Kolom Kriteria



Gambar 4.12 Tampilan Kolom Kriteria

Kolom Sebab



Gambar 4.13 Tampilan Kolom Sebab

Kolom Akibat



Gambar 4.14 Tampilan Kolom Akibat

Kolom Rekomendasi



Gambar 4.15 Kolom Rekomendasi

Kolom Antrian File / Upload file temuan



Gambar 4.16 Kolom Upload

Halaman telah dijawab



Gambar 4.17 Tampilan Jawab Halaman

- ✓ : Instrumen / pertanyaan yang telah dijawab.
- **Laporkan ke Ketua/Wakil** : Klik tombol Laporan Ke Ketua / Wakil

Status dari Sub Bidang Perkara Perdata

Kategori	Status
Keperaturan Perundang-undangan	0%
Kewenangan Perdata	100%
KEARIFAN PERKARA	0%
Perdata Agensi	0%

Gambar 4.18 Tampilan Presentasi Jawaban

Setelah instrumen atau pertanyaan telah 100% semua. Hasil pemeriksaan masuk ke user ketua atau wakil untuk di review atau di cek kembali.

- g. Melihat Pengadilan Tingkat Pertama yang telah melakukan pemeriksaan di satuan kerjanya.

The screenshot shows a monitoring dashboard with a sidebar menu on the left and a main table. The table has columns for 'ID', 'Nama Pengadilan', 'Jumlah', 'Selesai', and 'Persetujuan'. The first row is highlighted in blue. Red arrows point to the 'Selesai' and 'Persetujuan' columns for the first row.

ID	Nama Pengadilan	Jumlah	Selesai	Persetujuan
1	PERKARA PERDATA	100	100	100
2	PERKARA PERDATA	100	100	100
3	PERKARA PERDATA	100	100	100
4	PERKARA PERDATA	100	100	100
5	PERKARA PERDATA	100	100	100
6	PERKARA PERDATA	100	100	100
7	PERKARA PERDATA	100	100	100
8	PERKARA PERDATA	100	100	100
9	PERKARA PERDATA	100	100	100
10	PERKARA PERDATA	100	100	100
11	PERKARA PERDATA	100	100	100
12	PERKARA PERDATA	100	100	100
13	PERKARA PERDATA	100	100	100
14	PERKARA PERDATA	100	100	100
15	PERKARA PERDATA	100	100	100

Gambar 4.19 Tampilan Monitoring data Pengadilan Tingkat Pertama

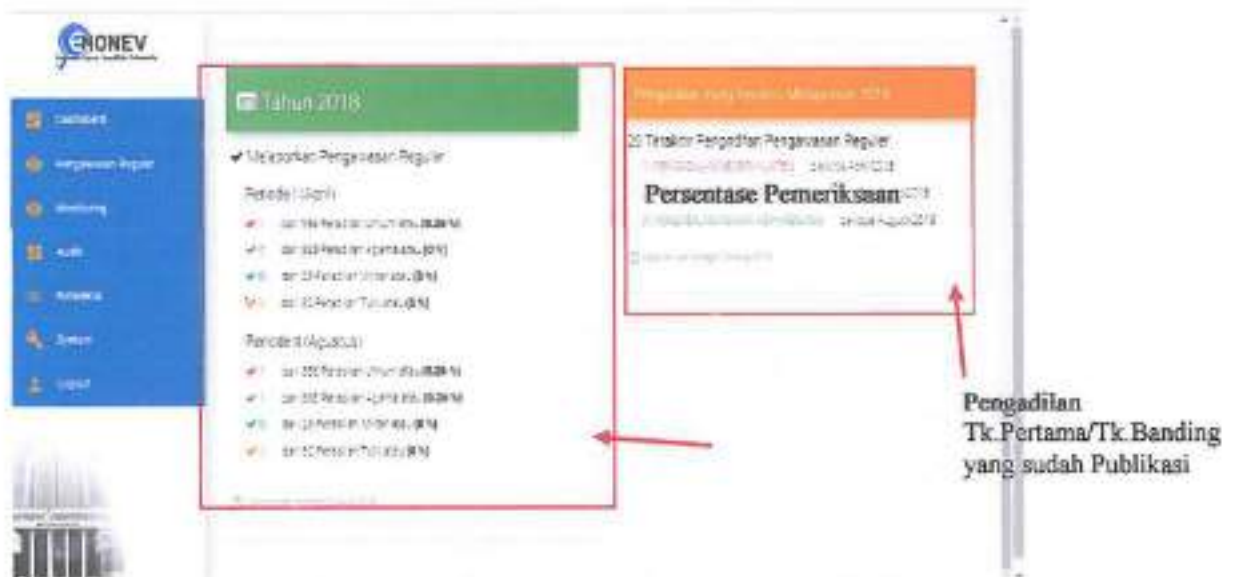
- h. Hasil pemeriksaan Tingkat Pertama dapat dilihat di menu monitoring.



Gambar 4.20 Tampilan Periode Laporan Pengawasan Reguler

Laporan Hasil Pemeriksaan dari Pengadilan Agama Kefamenanu yang sudah dipublikasikan oleh Ketua Pengadilan pada periode I dan II dapat di lihat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang/Tingkat Banding.

i. Tampilan Login /Halaman Utama Kepala Badan Pengawasan



Gambar 4.21 Tampilan Halaman Utama Kepala Badan Pengawasan

Melihat detail Laporan Hasil Pemeriksaan, dari masing-masing Dirjen.

Login Ketua Pengadilan untuk Melakukan review dan Publikasi ke Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan.



Gambar 4.22 Tampilan Laporan Hasil Pengawasan

Lalu masuk ke halaman detail perbulan



Gambar 4.23 Tampilan Laporan Detail Perbulan

3. Sistem Informasi Penelusuran Penanganan Pengaduan (SIP3)

Dengan telah diimplementasikan Siwas dan pelayanan publik yang transparan, cepat, mudah, efektif dan efisien maka perlu adanya sistem informasi yang dapat memantau serta memberikan laporan yang tepat, digunakan pimpinan dalam mengambil keputusan, untuk mendukung percepatan proses penyelesaian penanganan pengaduan.

Tujuan Pengembangan aplikasi SIP3 yang merupakan turunan dari aplikasi Siwas, berfungsi untuk memantau dan memberikan laporan secara akurat penanganan pengaduan yang dibutuhkan oleh unit kerja pada Badan Pengawasan. Perancangan pengembangan tampilan utama aplikasi SIP3 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.24 Dashboard Aplikasi SIP3

Aplikasi SIP3 diperuntukan untuk memantau data pengaduan yang datanya bersumber dari aplikasi Siwas, dimana seluruh pengaduan harus dimasukkan kedalam aplikasi Siwas. Dalam aplikasi tersebut juga akan ditambahkan fitur *chat* yang memungkinkan sesama pengguna dapat berkomunikasi dan notifikasi suara untuk mengetahui adanya pengaduan masuk dan penelaah yang ditunjuk.

4. Persiapan Piloting Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya

Pada Oktober 2016, *International Organization for Standardisation (ISO)* mengeluarkan standar ISO 37001 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Standar ini direspon oleh Pemerintah Indonesia melalui Inpres No.10 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang mengamanatkan standar setara untuk sektor swasta dan publik.

Manfaat Penerapan SNI ISO 37001

1	Membantu pencegahan penyuapan dan mengurangi dampaknya secara signifikan, apabila terjadi
2	Membantu meningkatkan kinerja bisnis (high level business)
3	Meningkatkan kepercayaan dan tata kelola sistem publik terhadap Organisasi
4	Membantu bukti bahwa Organisasi telah mengambil langkah yang memadai dalam mencegah penyuapan apabila terjadi insideng atau kasus penyuapan

SNI ISO 37001:2016

Sistem manajemen anti penyuapan - Persyaratan dengan panduan penggunaan

Anti-bribe management system - Requirements with guidance for use

pr. 37001:2016

BSN

Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I bekerjasama dengan USAID CEGAH mengadakan persiapan Piloting Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016) terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya. Dipilihnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Pengadilan Pilot Project dengan tujuan agar budaya jujur, bersih, transparan dan patuh sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Sistem Manajemen Anti Penyuapan sangat diperlukan agar tidak terjadi penyuapan pada Aparatur Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Penerapan standar ini akan membantu Mahkamah Agung untuk mengendalikan praktik penyuapan dengan cara mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menangani penyuapan.

Hasil Fase I Piloting Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016) terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai berikut:

- Pernyataan anti penyuapan
- Struktur Organisasi
- Panduan pelaksanaan penilaian Risiko Penyuapan
- Protokol respon terhadap dugaan dan insiden penyuapan serta eskalasi.

B. Kegiatan Badan Pengawasan

1. Penanganan Pengaduan

Tahun 2018 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 3.080 pengaduan, dengan rincian :

Tabel 4.1 : Penanganan Pengaduan Tahun 2018

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	2.119
2	Pengaduan dari instansi (<i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	523
3	Pengaduan Aplikasi Siwas	380
4	Pengaduan dari Satgas	58
Jumlah		3.080

Tindaklanjut atas penanganan pengaduan dapat diperinci dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 : Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2018

No	Jenis Tindaklanjut	Jumlah Tindak lanjut	
1	Masih Dalam Proses		919
2	Selesai diproses		2.161
	Pengaduan ditindaklanjuti		
	a. Diperiksa Tim Bawas	207	
	b. Delegasi ke Tingkat Banding	49	
	c. Delegasi ke Tingkat Pertama	477	
	d. Memorandum / Delegasi Internal	153	
	e. Dijawab Surat (instansi)	263	
	Pengaduan tidak ditindaklanjuti		
	a. Dijawab surat	631	
	b. Diarsipkan	381	
	Jumlah	2.161	3.080

Catatan :

Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi/materi Pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya.
- b. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun substansi/materi Pengaduannya logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya.
- c. Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi Pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk di konfirmasi atau di klarifikasi sebelum dilakukan pemeriksaan.
- d. Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan Pengaduan yang sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, direkomendasikan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi.

Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah Pengaduan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, tidak disertai data yang memadai dan tidak menunjang informasi yang diadukan.

- b. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara jelas, misalnya Pengaduan penanganan perkara yang tidak adil (tidak fair), yang tidak disertai dengan nama pengadilan, tempat kejadian atau nomor perkara dimaksud.
- c. Pengaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerja sebagai hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara di pengadilan, misalnya telah pensiun, telah pindah ke instansi lain.
- d. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.
- e. Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan.
- f. Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan, misalnya mengenai Advokat, Jaksa atau Polisi.
- g. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya.
- h. Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, oleh karena merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional (*unprofessional conduct*).
- i. Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

Terhadap Pengaduan yang tidak dapat ditindak lanjuti, diberitahukan alasannya kepada Pelapor, dalam hal:

- a. Pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan disarankan agar diajukan melalui mekanisme upaya hukum;
- b. Terlapor bukan pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan disarankan agar disampaikan kepada instansi yang berwenang, dan
- c. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.

2. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 2 orang hakim, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 : Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN	JENIS HUKUMAN/KETERANGAN
1	J W L, S.H	Hakim PN. Yogyakarta	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun)
2	E W	Hakim PN. Kupang	Berdasarkan surat keputusan Presiden No. 149/P yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim di Lingkungan Peradilan Umum, sehingga sidang Majelis Kehormatan Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran perilaku hakim.

Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dilaksanakan melalui Sidang Majelis Kehormatan Hakim dari Tahun 2016 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4: Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Sidang Majelis Kehormatan Hakim dari Tahun 2016 s.d. 2018

NO	JENIS HUKUMAN	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Diberhentikan tidak dengan hormat	-	-	-	-
2	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.	3	2	-	5
3	Pemberhentian dengan hak pensiun	-	-	1	1
4	Non Palu selama 3 bulan	-	-	-	-
5	Non Palu selama 6 bulan	-	-	-	-
6	Non Palu selama 13 bulan	-	-	-	-
7	Teguran tertulis	-	-	-	-
	TOTAL	3	2	1	6

Jumlah hakim yang diajukan dan diputus dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian menurun pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) orang dan pada tahun 2018 yang diajukan ke MKH sebanyak 2 (dua) orang namun oleh karena 1 (satu) orang telah mengundurkan diri sehingga yang diputuskan dalam sidang MKH hanya 1 (satu) orang.



Gambar 4.25 : Sidang Majelis Kehormatan Hakim 2018

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Sebagai tindak lanjut surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I, pada tahun 2018 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 163 aparat peradilan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5: Hukuman Disiplin Tahun 2018

NO	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	24	27	50	101
	Hakim Ad Hoc	1	-	1	2
2	Panitera	2	1	3	6
3	Sekretaris	-	-	4	4
4	Panitera Muda	1	1	3	5
5	Panitera Pengganti	8	3	8	19
6	Jurusita	1	-	3	4
7	Jurusita Pengganti	1	1	3	5
8	Pejabat Struktural	1	-	6	7
9	Staf	4	2	4	10
Jumlah		43	35	85	163

*) Data tersebut termasuk rekomendasi dari Komisi Yudisial RI yang menyangkut pelanggaran non teknis yudisial (sebanyak 11 orang hakim) yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung RI.

Badan Pengawasan juga mengeluarkan surat keterangan bila ternyata dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran seperti yang diadukan, sehingga terlapor dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya. Jumlah terlapor yang dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Data Pemulihan Nama Baik Tahun 2018

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	99
2.	Panitera	9
3.	Sekretaris	3
4.	Panitera Muda	9
5.	Panitera Pengganti	9
6.	Jurusita	2
7.	Jurusita Pengganti	3
8.	Pejabat Struktural	2
9.	Staf	-
10.	Calon Hakim	-
11.	Honorar	2
TOTAL		138

4. Penguatan Sistem Pengawasan

a. Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan

Penguatan Sistem Pengawasan antara lain dilakukan dengan Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan serta Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan pada Seluruh Pengadilan Tingkat Banding.

Tabel 4.7 : Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan

No	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Padang 12 s.d 14 April 2018	Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Pengawas Bidang Tingkat Pertama	122 orang	Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang
2	Ambon 03 s.d 6 Mei 2018	Hakim Pengawas Bidang Tingkat Banding dan Hakim Pengawas Bidang Tingkat Pertama	68 orang	
3	Sidoarjo 9 s.d 11 Agustus 2018	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Pengawas Daerah, dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah	73 orang	Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan
4	Bekasi 27 s.d 29 September 2018	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim Pengawas Daerah	65 orang	

Adapun materi yang disampaikan dari Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan tersebut di atas sebagai berikut:



b. Consulting Dalam Rangka Peningkatan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan masih dijumpai sebagian para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara dan Kasir yang belum optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya, hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi serta kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan melekat, demi mendorong tumbuhnya kesadaran para Aparatur Peradilan di bidang sistem pengawasan aparat peradilan, maka Badan Pengawasan mengadakan kegiatan *Consulting* dengan materi-materi meliputi Pemuliaan Peradilan dan Peningkatan Pengawasan.

Kegiatan *Consulting* diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Hakim, Panitera, Sekretaris dan Aparatur Peradilan dalam melaksanakan bidang pengawasan.

Tabel 4.8 : Kegiatan *Consulting* Dalam Rangka Peningkatan Pengawasan

No	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Jumlah Peserta
1	Pontianak 25.s.d 27 Oktober 2018	Wakil Ketua Pengadilan, Sekretaris, Panitera, Pejabat Pembuat Komitmen	89 orang
2	Yogyakarta 1 s.d 3 November 2018	Ketua Pengadilan/ Wakil Ketua Pengadilan, Panitera/ Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen, Kasir	112 orang

c. Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*)

Quality Assurance (QA) adalah salah satu program Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian, adanya jaminan atas kualitas penyelenggaraan tugas pokok, baik yang terkait dengan output yang dihasilkan maupun yang berkaitan dengan proses yang diperlukan dan pelayanan yang diberikan. QA merupakan kegiatan yang meliputi usaha pemantauan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti berbagai temuan atas kinerja seluruh aparat peradilan. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah dengan diadakannya *Focus Group Discussion* (FGD) yang dapat menjadi wadah bagi para peserta untuk mengemukakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok, seperti misalnya membahas temuan yang berkaitan dengan :

- Keuangan perkara dan keuangan DIPA.
- Memastikan bahwa seluruh proses atau prosedur kegiatan yang telah direncanakan diimplementasikan sesuai dengan standar / ketentuan yang berlaku.
- Membahas permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akuntansi akrual sebagai dampak masa transisi dari pelaporan keuangan berbasis kas ke basis akrual. Hal ini menjadi penting karena permasalahan pelaporan keuangan berbasis akrual relatif lebih kompleks dibanding pelaporan keuangan berbasis kas.

Data permasalahan yang ditampung dari hasil FGD dibedakan atas:

- a) Permasalahan yang telah ada atau jelas regulasinya langsung diberikan pemecahan berdasarkan aturan atau regulasi yang telah ada.
- b) Permasalahan yang belum ada atau belum jelas regulasinya ditampung oleh Badan Pengawasan untuk dijadikan bahan informasi atau diskusi dengan Ditjen terkait agar dapat segera dirumuskan kebijakan sesuai kebutuhan di lapangan.

Tabel 4.9 : Kegiatan *Quality Assurance*

No	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Jumlah Peserta
1	Banjarmasin 5 - 7 Juli 2018	Panitera, Sekretaris, PPK, Panitera Muda Banding (PT dan PTA), Panitera Muda Perdata (PN), Panitera Muda Gugatan (PA), Panitera Muda Pidana (Dilmil), Panitera Muda Perkara (PTUN)	116 orang
2	Aceh 23 - 25 September 2018	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Panitera, Pejabat Pembuat Komitmen/ Bendahara	123 orang
TOTAL			239 orang



Gambar 6.26 : Rapat Koordinasi, *Consulting* dan *Quality Assurance*

Secara garis besar rumusan hasil pembahasan QA tersebut di atas adalah:

- a) Pengelolaan keuangan DIPA dan Pengelolaan Barang Milik Negara harus berpedoman pada prinsip efektif, efisien dan ekonomis.
- b) Keuangan Perkara dan uang titipan pihak ketiga harus berpedoman pada kebijakan Mahkamah Agung.
- c) Badan Pengawasan melakukan identifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan Perkara sehingga diperoleh peta risiko beserta mitigasinya.

5. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

a. Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan dalam Tahun 2018, telah melakukan pemeriksaan reguler tersebut pada 129 satuan kerja (Satker), seperti tabel berikut:

Tabel 4.10 : Data Pengawasan Reguler Tahun 2018

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	24	24	15	8	71
Peradilan Agama	14	16	8	8	46
Peradilan Militer	1	2	1	1	5
Peradilan TUN	1	1	2	2	6
Pengadilan Pajak		1			1
Total					129

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.11 : Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2018

No	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1	Manajemen Peradilan	415	Program Kerja, Evaluasi Kegiatan, Standar Pelayanan
2	Administrasi Persidangan	722	Persidangan, Minutasi Berkas Perkara
3	Administrasi Perkara	924	Uang Konsinyasi, Bunga Bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke Bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, dll.
4	Administrasi Umum	1.775	Panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui Bank dan disimpan dalam brankas Pengadilan, Pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan <i>e-purchasing</i> menyebabkan adanya Indikasi kemahalan harga, dll.

5	Kinerja Pelayanan Publik	525	Penanganan Pengaduan, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum)
---	--------------------------	-----	--

b. Reguler Pendampingan

Pengawasan Reguler Pendampingan bertujuan untuk :

- Pelaksanaan fungsi assurance (pengawasan fungsional), penguatan kapabilitas dan asistensi pelaksanaan pengawasan kepada hakim tinggi pengawas daerah;
- Efektivitas penyampaian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada suatu wilayah.

Pada tahun 2018 Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah melaksanakan pengawasan Reguler Pendampingan pada beberapa satuan kerja sebagai berikut :

Tabel 4.11 : Data Pengawasan Reguler Pendampingan Tahun 2018

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	3	4	5	-	12
Peradilan Agama	4	4	2	-	10
Peradilan Militer	-	-	-	-	-
Peradilan TUN	1	-	-	-	1
Total					23

c. Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP

Badan Pengawasan bekerjasama dengan KPK dan BPKP melakukan uji petik pemeriksaan reguler bersama terhadap beberapa Satuan Kerja yaitu:

- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- Pengadilan Tinggi Jawa Barat
- Pengadilan Negeri Bandung
- Pengadilan Tinggi Palembang
- Pengadilan Negeri Palembang

Maksud dan Tujuan dilakukan pemeriksaan Reguler bersama :

- Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar
- Meningkatkan kinerja pelayanan publik
- Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan
- Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan
- Mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar

6. Satuan Tugas Khusus Pengawasan

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 54/BP/SK/IX/2016 tanggal 02 September 2016, tentang Penetapan Satuan Tugas Khusus Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, sebagai dasar kegiatan untuk melakukan pemantauan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung RI, meningkatkan kedisiplinan aparatur serta memaksimalkan pelayanan pengaduan.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan untuk tahun 2018 difokuskan pada penerimaan pengaduan dari masyarakat yang secara khusus diterima dan dilayani oleh petugas meja pengaduan di lantai dasar Gedung Mahkamah Agung berdekatan dengan meja petugas informasi, dan keseluruhan dokumen terkait pengaduan yang diterima diteruskan ke bagian umum/penerimaan pengaduan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk dicatat agenda nomornya dengan diberikan kode pengaduan secara khusus dari Satgas.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan di meja pengaduan Mahkamah Agung telah menerima sebanyak 58 pengaduan yang, terdiri dari :

- Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah I sebanyak 8 pengaduan.
- Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah II sebanyak 39 pengaduan.
- Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah III sebanyak 9 pengaduan.
- Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah IV sebanyak 2 pengaduan.

7. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2018 telah melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada pengelolaan keuangan Negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 100 Satker sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.12: Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2018

Tingkatan Pengadilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	20	15	14	8	57
Peradilan Agama	7	9	9	5	30
Peradilan TUN	3	3	1	0	7
Peradilan Militer	2	3	1	0	6
Total	32	30	25	13	100

Catatan :

- Wilayah I : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.
- Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
- Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
- Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

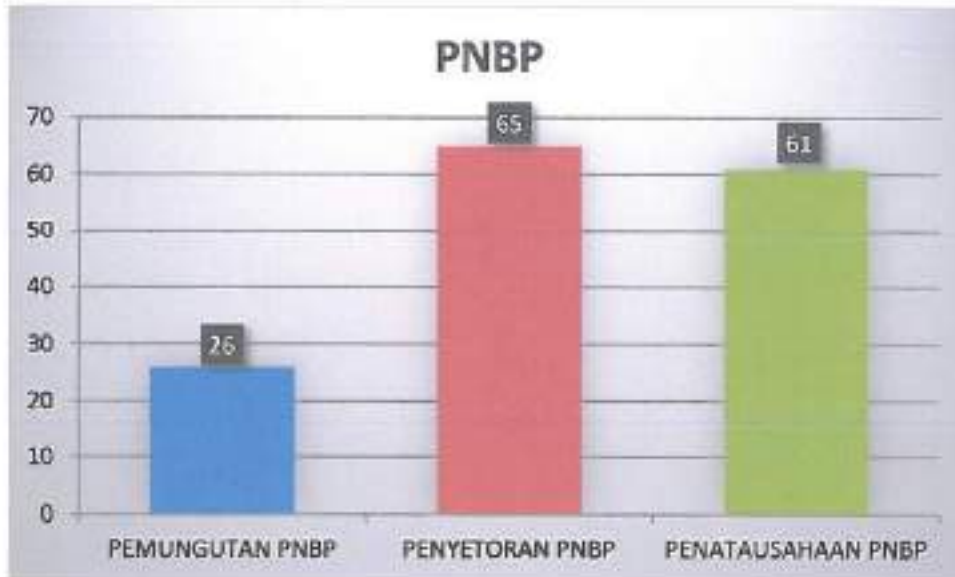
- a. Hasil temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2018, adalah sebagaimana grafik batang berikut:



Grafik 4.1 : Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara Tahun 2018

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait penatausahaan persediaan dari biaya proses lebih dominan yakni mencapai 162 temuan (47,50%), sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan sistem penatausahaan persediaan yang dibiayai dari biaya proses.

- b. Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2018, adalah sebagaimana grafik batang berikut:



Grafik 4.2 : Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP Tahun 2018

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP menggambarkan bahwa temuan terkait penyeteroran PNBP lebih dominan yakni mencapai 65 temuan (42,76%), sehingga perlu dilakukan langkah – langkah guna mendorong terlaksananya penyeteroran PNBP sesuai aturan yang berlaku (pengawasan intern).

- c. Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja berdasarkan bidang Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2018, adalah sebagaimana grafik batang berikut :



Grafik 4.3 : Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Pelayanan Publik Tahun 2018

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang pelayanan publik menggambarkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik kurang maksimal sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan temuan kualitas standar pelayanan mencapai 163 temuan (42,33%) sedangkan terkait kualitas sistem informasi pelayanan terdapat 72 temuan (18,70 %). Pada indikator lain terkait Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik terdapat 77 temuan (20%) dan terkait proses penangan pengaduan terdapat 73 temuan (18,96%).

8. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Badan Pengawasan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Satker eselon I Pusat dan Peradilan Tingkat Banding berjumlah 74 Satker dengan maksud untuk:

- a. Memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP;
- b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit/Satuan Kerja
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Tabel 4.13: Hasil Evaluasi LkjIP pada Inspektur Wilayah I

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2017 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2018)						
No	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	2	-	-	-
3	>70 – 80	BB	6	5	1	1
4	>60 – 70	B	1	1	-	-
5	>50 – 60	CC	-	2	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			9	9	1	1

Tabel 4.14 : Hasil Evaluasi LkjIP pada Inspektur Wilayah II

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2017 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2018)								
No	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI	DILMIL TAMA	ESELON I
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	-	-	-	-	-	-
3	>70 – 80	BB	5	5	-	2	1	4
4	>60 – 70	B	-	-	1	-	-	2
5	>50 – 60	CC	2	1	1	-	-	1
6	>30 – 50	C	-	-	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-	-	-
Jumlah			7	6	2	2	1	7

Tabel 4.15 : Hasil Evaluasi LkjIP pada Inspektur Wilayah III

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2017 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2018)						
No	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	-	-	-	-
3	>70 – 80	BB	5	7	1	-
4	>60 – 70	B	2	2	-	-
5	>50 – 60	CC	2	-	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			9	9	1	0

Tabel 4.16 : Hasil Evaluasi LkjIP pada Inspektur Wilayah IV

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2017 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2018)					
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	-	1	-	-
3	>70 – 80	BB	4	2	-	-
4	>60 – 70	B	1	2	-	-
5	>50 – 60	CC	-	-	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			5	5	0	0

9. Penilaian Zona Integritas

Mahkamah Agung telah berupaya membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Adapun hasil penilaian atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang diusulkan ke Kementerian Pendayaaangunaan Negara dan Reformasi Birokrasi setelah dievaluasi sebagai Duta Reformasi Birokrasi dan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal mahkamah Agung sebagai berikut :

Tabel 4.17 : Daftar Nama Satker Usulan Penilaian Zona Integritas

No	Objek Penilaian	Penilaian Mandiri	Nilai IPI	Kesimpulan
1	Pengadilan Agama Stabat	-	94,96	Diusulkan WBK (Nilai Th.2017)
2	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	-	89,26	Diusulkan WBK (Nilai Th.2017)
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	-	88,03	Diusulkan WBK (Nilai Th.2017)
4	Pengadilan Militer III-13 Madiun	92,13	87,92	Diusulkan WBK
5	Pengadilan Tinggi Bandung	90,43	87,46	Diusulkan WBK
6	Pengadilan Agama Lubuk Basung	93,33	87,12	Diusulkan WBK

7	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	-	86,17	Diusulkan WBK (Nilai Th.2017)
8	Pengadilan Negeri Mempawah	-	85,82	Diusulkan WBK
9	Pengadilan Militer III-12 Surabaya	92,82	85,79	Diusulkan WBK
10	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang	91,80	85,45	Diusulkan WBK
11	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	87,80	85,05	Diusulkan WBK
12	Pengadilan Negeri Bau Bau	-	84,70	Diusulkan WBK
13	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	-	84,00	Diusulkan WBK (Nilai Th.2017)
14	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	90,73	83,46	Diusulkan WBK
15	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	84,15	82,46	Diusulkan WBK
16	Pengadilan Negeri Sekayu	85,69	82,29	Diusulkan WBK
17	Pengadilan Militer II-08 Jakarta	79,04	80,92	Diusulkan WBK
18	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	81,99	80,62	Diusulkan WBK
19	Pengadilan Negeri Yogyakarta	81,05	80,62	Diusulkan WBK
20	Pengadilan Agama Surabaya	85,50	80,07	Diusulkan WBK
21	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	-	85,02	Diusulkan WBK
22	Pengadilan Negeri Banyuwangi	-	90,14	Diusulkan WBK
23	Pengadilan Negeri Situbondo	-	83,40	Diusulkan WBK

Setelah melalui proses evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari 23 satker yang diusulkan tersebut akhirnya 7 satker yang mendapatkan Apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tanggal 10 Desember 2018 di Golden Ballroom Hotel Sultan Jakarta yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI dan Instansi terkait lainnya, ketujuh satker tersebut adalah :

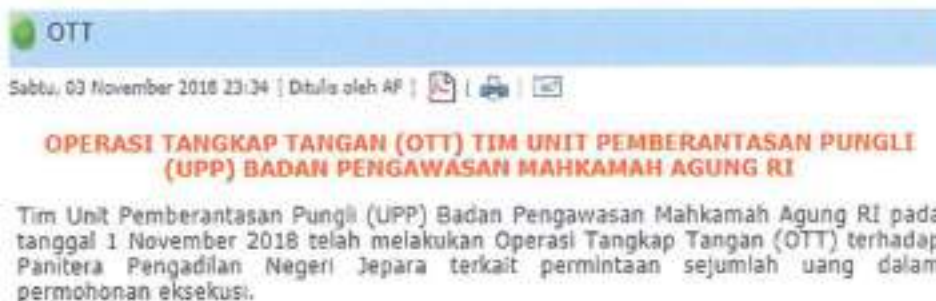
- a. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
- b. Pengadilan Tinggi Jawa Barat
- c. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
- d. Pengadilan Agama Surabaya

- e. Pengadilan Militer II-08 Jakarta
- f. Pengadilan Militer III-03 Madiun
- g. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

10. Capaian Hasil Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)

Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui *Mysterious Shopper* pada tahun 2018 telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap 13 (tiga belas) pengadilan yaitu :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. PN Jakarta Selatan | 8. PA Ambon |
| 2. PN Bandung | 9. PN Merauke |
| 3. PN Jepara | 10. PA Kendari |
| 4. PN Jayapura | 11. PA Wonogiri |
| 5. PA Jayapura | 12. PN Ternate |
| 6. PN Mataram | 13. PN Balikpapan |
| 7. PN Ambon | |



Gambar 4.27 : Website Badan Pengawasan

11. Inspeksi Mendadak

Inspeksi mendadak bertujuan untuk memonitoring kedisiplinan aparatur pengadilan karena masih terdapat aparatur peradilan yang kurang disiplin. Pelaksanaan inspeksi mendadak pada tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 4.18 : Pelaksanaan Inspeksi Mendadak

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Mahkamah Agung	-	1	-	-	1
Peradilan Umum	3	4	4	2	13
Peradilan Agama	2	-	3	4	9
Peradilan TUN	1	3	4	3	11
Peradilan Militer		2	1	-	3
Total	6	10	12	9	37

12. Survei Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan Pengadilan

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan SUSTAIN EU-UNDP dan LP3ES melaksanakan survei terkait kepuasan publik terhadap pelayanan pengadilan di Indonesia sebanyak 60 satker yang terdiri dari :

Tabel 4.19 : Survei Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Pengadilan

No	Nama Satker	No	Nama Satker	No	Nama Satker
1	PN Banda Aceh	21	PTUN Bandung	41	PA Banjarmasin
2	MS Banda Aceh	22	PN Wates	42	PTUN Banjarmasin
3	PTUN Banda Aceh	23	PA Yogyakarta	43	PN Balikpapan
4	PN Stabat	24	PTUN Yogyakarta	44	PA Balikpapan
5	PN Binjai	25	PN Malang	45	PTUN Samarinda
6	PTUN Medan	26	PN Kepanjen	46	PN Manado
7	PN Padang	27	PTUN Surabaya	47	PN Tondano
8	PA Pariaman	28	PN Denpasar	48	PTUN Manado
9	PTUN Padang	29	PN Gianyar	49	PN Kendari
10	PN Kayu Agung	30	PTUN Denpasar	50	PA Kendari
11	PA Palembang	31	PN Praya	51	PTUN Kendari
12	PTUN Palembang	32	PA Praya	52	PN Makassar
13	PN Pangkal Pinang	33	PTUN Mataram	53	PA Makassar
14	PA Pangkal Pinang	34	PN Labuhan Bajo	54	PN Sungguminasa
15	PN Sungai Liat	35	PA Labuhan Bajo	55	PN Ambon
16	PN Jakarta Barat	36	PN Cibinong	56	PA Ambon
17	PA Jakarta Timur	37	PN Pontianak	57	PTUN Ambon
18	PTUN Jakarta	38	PA Pontianak	58	PN Jayapura
19	PN Bandung	39	PTUN Pontianak	59	PN Sorong
20	PA Bandung	40	PN Martapura	60	PTUN Jayapura

C. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan telah melakukan kegiatannya selaku APIP sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.20 : Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
1	Reviu Laporan Keuangan	Dilaksanakan reviu laporan keuangan sebanyak 3 (tiga) kali meliputi reviu: 1) Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2017 pada bulan Februari 2018; 2) Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 pada bulan Juli 2018; 3) Laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif Tahun Anggaran 2018 pada bulan Nopember 2018. Catatan : Laporan Keuangan MA RI TA 2017

		memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2	Reviu RKA K/L	Dilaksanakan pada Mahkamah Agung RI dan reviu RKA-KL di 3 (tiga) wilayah selama bulan September 2018 yaitu: 1. Reviu RKA K/L wilayah Sulawesi Utara; 2. Reviu RKA K/L wilayah Sumatera Barat; 3. Reviu RKA K/L wilayah Nusa Tenggara Timur
3	Reviu RKBMN Online	Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Oktober 2018 di Mahkamah Agung RI untuk TA 2020
4	Reviu Tender Pra DIPA dan Reviu PA PBJ	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil reviu dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai lebih dari 80% dari rencana penyerapannya, yakni dengan rincian sebagai berikut: - Belanja Pegawai mencapai 97,16% senilai Rp6.117,8 Milyar - Belanja Barang mencapai 95,37% senilai Rp1.225,8 Milyar - Belanja Modal mencapai 98,44% senilai Rp588,3 Milyar - Berdasarkan Skoring Kualitas Belanja yang dikembangkan BPKP maka nilai Kualitas Belanja Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mencapai 88,75 yakni Peringkat Kualitas Belanja Sangat Baik. - Berbeda halnya dengan capaian kualitas belanja di tahun 2017 lalu, Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Jasa Pra-DIPA sampai dengan 25 Januari 2018 hanya sebanyak 13 (tigabelas) Paket atau hanya sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah Paket PBJ Tahun 2018 dengan nilai Rp35.995.300.000,- atau sekitar 8% (delapan persen) dari Nilai PBJ Tahun 2018.
5	Pemeriksaan Keuangan	Secara umum, pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan perkara telah dilakukan pengendalian intern secara efektif, namun masih ditemukan kesalahan administratif yang berdampak pada kerugian negara yang diselesaikan melalui mekanisme penyeteroran ke kas negara atau proses tuntutan ganti rugi (TGR), sedangkan untuk kesalahan yang bersifat perbaikan pencatatan administrasi sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan pada saat berlangsungnya pemeriksaan sehingga diharapkan permasalahan tersebut tidak terulang di tahun berikutnya
6	Audit Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Secara umum, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah memperhatikan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu dan terdapat kekurangan volume pekerjaan; - Pemanfaatan pengadaan berbasis elektronik melalui <i>e-purchasing</i> belum optimal

7	<i>Consulting dan Assurance</i>	Pada tahun 2018 QA dilakukan sebanyak 4 kali
8	<i>Liaison Officer (LO)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 dengan hasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 6 (enam) kali berturut-turut. 2. Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga dan Belanja Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan Semester I Tahun 2018 pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. 3. Pemeriksaan Pendahuluan atas Pelayanan Peradilan dan Pengeolaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. 4. Pemeriksaan Terinci atas Pelayanan Peradilan dan Pengeolaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. 5. Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017 di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 6. Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2018 di wilayah Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.

D. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MA-RI)

Selama tahun 2018 Aplikasi Siwas telah menerima:

- | | |
|---|-------|
| 1. Pengaduan dari Pelapor secara mandiri | : 265 |
| 2. Pengaduan dari Meja Pengaduan 4 Lingkungan Peradilan | : 107 |
| 3. Pengaduan atas Inisiatif sendiri dari Pengadilan Tingkat Banding | : 6 |
| 4. Pengaduan dari Delegasi Pengadilan Tingkat Banding | : 5 |

E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

- a) Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan semester I tahun 2018 sebanyak 488 temuan pemeriksaan dengan 986 rekomendasi. Hingga Semester I tahun 2018 sebanyak 797 rekomendasi atau sebesar 80,83% sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi BPK, sebanyak 64 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, 114 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan 11 rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- b) Total nilai temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan semester I tahun 2018 sebesar Rp43.166.669.702,74 nilai rekomendasi sebesar Rp32.952.953.713,63. Hingga Semester I Tahun 2018 sebesar Rp24.273.013.323,80 sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 73,66 %, nilai yang masih dalam proses tindak lanjut sebesar Rp4.682.812.459,00 atau sebesar 14,21 % dan nilai sebesar Rp523.228.818,83 atau sebesar 1,59 % tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Total nilai aset atau penyetoran uang ke kas negara sejak tahun 2005 sampai dengan Semester I tahun 2018 sebesar Rp26.549.410.435,12.

Mahkamah Agung telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) sampai dengan semester I Tahun 2018 sebesar 80,83 %, sisa yang belum ditindaklanjuti sejumlah Rp.3.473.899.112,00 (10,54 %) pejabat yang ditunjuk dalam rekomendasi BPK untuk membuat kebijakan tidak sesuai dengan kewenangannya.

Catatan : Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK tersebut adalah berdasarkan data per Semester I 2018, sedangkan untuk data per Semester II 2018 belum mendapatkan data dari BPK.

F. Internal Audit Capability Model (IACM)

Salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur efektivitas peran unit audit intern di sektor publik adalah model penilaian yang disebut *Internal Audit Capability Model (IACM)* atau model kapabilitas audit intern. IACM merupakan suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan bagi terwujudnya unit audit internal yang efektif di sektor publik. IACM menggambarkan jalur evolusi yang perlu diikuti oleh organisasi sektor publik dalam mengembangkan unit audit intern yang efektif memenuhi harapan profesional dan kebutuhan tata kelola organisasi. IACM menunjukkan langkah-langkah perkembangan unit audit intern dari level yang kurang mapan menuju level yang kuat dan efektif.

Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I Tahun 2017, dijumpai kelemahan dalam *Key Process Area* (KPA) dan pemenuhan pernyataan untuk masing-masing elemen. Perkembangan pelaksanaan rencana tindak perbaikan peningkatan Kapabilitas APIP pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung saat ini, berdasarkan hasil sementara IACM Badan Pengawasan MA RI sudah level 3 dengan catatan yang sebelumnya level 2.

G. Capaian Kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Kegiatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan digambarkan pada capaian Kinerja Badan Pengawasan yang tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.20 : Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2018

Pemeriksaan / Kegiatan	Wilayah				Jumlah Realisasi	Target	Persentase
	I	II	III	IV			
Kasus	46	78	36	21	181	148 LHP	122%
Reguler	49	52	32	19	152	89 LHP	171%
Audit PBJ	3	2	3	3	11	8 LHP	137%
Reviu RKAKL dan Reviu RKBMN	1	2	1	1	5	4 LHP	125%
Reviu LK	0	6	0	0	6	2 LHP	300%
Pemeriksaan Kinerja / Integritas	31	31	26	12	100	78 LHP	128%
Pemeriksaan Keuangan	4	2	2	2	10	10 LHP	100%
Evaluasi LkjIP	20	25	19	10	74	74 LHE	100%
Audit Manajemen Kepegawaian	1	1	1	1	4	4 LHP	100%
Monitoring	3	6	3	3	15	12 LHP	125%
TOTAL	158	205	123	72	558	429	141%

Catatan : Dari capaian, Realisasi Anggaran (99,81%)

Pagu : Rp 33.944.916.000
 Realisasi : Rp 33.880.365.259 (99,81%)
 Sisa : Rp 64.550.741

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah menyusun Laporan Tahunan 2018, laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 dan sebagai upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, atas hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengelolaan

a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2018, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 162 (seratus enam puluh dua) orang, yang terdiri dari Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, staf dan Honorer.

Pada tahun 2018, jumlah aparat pada Badan Pengawasan berjumlah 162 orang yang terdiri dari tenaga teknis yudisial berjumlah 55 orang, tenaga non teknis yudisial berjumlah 90 orang dan tenaga honorer berjumlah 17 orang.

b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2018, dalam hal ini Barang Milik Negara (BMN) dikelompokkan menjadi peralatan dan mesin 1.808 unit dengan nilai Rp. 12.464.038.691, aset tetap lainnya 2.290 buah dengan Rp. 535.403.685, aset tak berwujud 12 unit senilai Rp. 2.624.583.965, Sehingga total pengelolaan sarana dan prasarana adalah sebesar Rp. 13.372.343.593.

Perolehan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari pembelian dengan anggaran DIPA tahun anggaran 2018 adalah 153 Unit dengan Total Rp 493.373.920 (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)

c. Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengelola 1 (satu) DIPA Nomor : SP DIPA-005.07.1.663136/2018 Tanggal 5 Desember 2017 dengan jumlah PAGU sebesar Rp. 33.944.916.000,- terdiri dari:

Tabel 5.1 : Pengelola Keuangan Pada DIPA Badan Pengawasan

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Penyerapan
1	Belanja Pegawai	Rp. 5.124.662.000,-	Rp. 5.081.576.841,-	99,16%
2	Belanja Barang	Rp. 28.320.254.000,-	Rp. 28.301.374.498,-	99,93%
3	Belanja Modal	Rp. 500.000.000,-	Rp. 497.413.920,-	99,48%
	Jumlah	Rp 33.944.916.000,-	Rp. 33.880.365.259,-	99,81%

Capaian kegiatan Badan Pengawasan Tahun 2018 dengan target 429 Kegiatan/pemeriksaan terealisasi 558 Kegiatan/pemeriksaan (141%)

2. Penanganan Pengaduan

Pada tahun 2018, Jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sejumlah 3.080 pengaduan. Untuk pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan sejumlah 2.119 pengaduan, untuk pengaduan dari instansi / stakeholder Mahkamah Agung sejumlah 523 pengaduan, Pengaduan Aplikasi Siwas sejumlah 380 pengaduan dan Pengaduan dari Satgas sejumlah 58 pengaduan.

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Sebagai tindaklanjut surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I, pada tahun 2018 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 163 aparat peradilan. Data tersebut termasuk rekomendasi dari Komisi Yudisial RI yang menyangkut pelanggaran non teknis yudisial (sebanyak 11 orang hakim) yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung RI.

4. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Jumlah hakim yang diajukan dan diputus dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian menurun pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) orang dan pada tahun 2018 yang diajukan ke MKH sebanyak 2 (dua) orang namun oleh karena 1 (satu) orang telah mengundurkan diri sehingga yang diputuskan dalam sidang MKH hanya 1 (satu) orang.

5. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan telah melakukan kegiatannya selaku APIP yaitu diantaranya :

- a) Reviu Laporan Keuangan, dilaksanakan reviu laporan keuangan sebanyak 3 (tiga) kali;
- b) Reviu RKA K/L, Dilaksanakan pada Mahkamah Agung RI dan reviu RKA-KL di 3 (tiga) wilayah selama bulan September 2018;
- c) Reviu RKBMN Online, Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Oktober 2018 di Mahkamah Agung RI untuk TA 2020;
- d) Reviu Tender Pra DIPA dan Reviu PA PBJ, Berdasarkan hasil reviu dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai lebih dari 80% dari rencana penyerapannya;
- e) Pemeriksaan Keuangan, Secara umum, pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan perkara telah dilakukan pengendalian intern secara efektif, namun masih ditemukan kesalahan administratif yang berdampak pada kerugian negara yang diselesaikan melalui mekanisme penyetoran ke kas negara atau proses tuntutan ganti rugi (TGR), sedangkan untuk kesalahan yang bersifat perbaikan pencatatan administrasi sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan pada saat berlangsungnya pemeriksaan sehingga diharapkan permasalahan tersebut tidak terulang di tahun berikutnya;
- f) Audit Pengadaan Barang/Jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah memperhatikan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu dan terdapat kekurangan volume pekerjaan; Pemanfaatan pengadaan berbasis elektronik melalui *e-purchasing* belum optimal;
- g) Consulting dan Assurance, Pada tahun 2018 QA dilakukan sebanyak 4 kali;
- h) *Liaison Officer* (LO), Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 dengan hasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 6 (enam) kali berturut-turut.

6. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

a. Pemeriksaan Reguler

Tahun 2018 Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan Reguler pada 129 Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 71 satker. Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 46 satker. Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 5 satker, Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 6 satker dan Pengadilan Pajak berjumlah 1 satker.

b. Pemeriksaan Reguler Pendampingan

Tahun 2018 Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan Reguler Pendampingan pada 23 Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 12 satker. Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 10 satker dan Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 1 satker.

c. Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP

Badan Pengawasan Mahkamah Agung bekerjasama dengan KPK dan BPKP untuk melakukan pemeriksaan reguler bersama pada beberapa Pengadilan yang dijadikan sampling uji petik terhadap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Palembang, dan Pengadilan Negeri Palembang.

7. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2017 (pelaksanaan Tahun 2018) terdapat 3 Satker (4,05%) memperoleh nilai A, 49 Satker (66,21%) memperoleh nilai BB, 12 Satker (16,21%) memperoleh nilai B, dan 10 Satker (13,51%) memperoleh nilai CC. Jika dibandingkan dengan Hasil Evaluasi LkjiP Tahun 2016 (pelaksanaan Tahun 2017) ada kecenderungan nilai A dan nilai BB meningkat. Untuk melakukan evaluasi Laporan Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah merupakan kewajiban pengadilan tingkat banding sesuai wilayah hukumnya.

8. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai pengawas Internal pada tahun 2018 telah melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada pengelolaan keuangan Negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 100 Satker.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 57 satker. Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 30 satker. Di Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 7 satker dan di Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 6 satker.

9. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

- a) Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan semester I tahun 2018 sebanyak 488 temuan pemeriksaan dengan 986 rekomendasi. Hingga Semester I tahun 2018 sebanyak 797 rekomendasi atau sebesar 80,83% sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi BPK, sebanyak 64 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, 114 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan 11 rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- b) Total nilai temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan semester I tahun 2018 sebesar Rp43.166.669.702,74 nilai rekomendasi sebesar Rp32.952.953.713,63. Hingga Semester I Tahun 2018 sebesar Rp24.273.013.323,80 sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 73,66 %, nilai yang masih dalam proses tindak lanjut sebesar Rp4.682.812.459,00 atau sebesar 14,21 % dan nilai sebesar Rp523.228.818,83 atau sebesar 1,59 % tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Total nilai aset atau penyetoran uang ke kas negara sejak tahun 2005 sampai dengan Semester I tahun 2018 sebesar Rp26.549.410.435,12.

Mahkamah Agung telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) sampai dengan semester I Tahun 2018 sebesar 80,83 %, sisa yang belum ditindaklanjuti sejumlah Rp.3.473.899.112,00 (10,54 %) pejabat yang ditunjuk dalam rekomendasi BPK untuk membuat kebijakan tidak sesuai dengan kewenangannya.

Catatan : Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK tersebut adalah berdasarkan data per Semester I 2018, sedangkan untuk data per Semester II 2018 belum mendapatkan data dari BPK.

10. Penguatan Sistem Pengawasan

Pada tahun 2018 Badan Pengawasan telah melaksanakan Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan yang telah dilaksanakan pada 6 (enam) wilayah yaitu: Padang, Ambon, Sidoarjo, Bekasi, Yogyakarta, dan Pontianak dengan total peserta sejumlah 529 orang.

Pada tahun 2018 kegiatan Quality Assurance (penjaminan kualitas) telah dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu Banjarmasin yang diikuti oleh 116 peserta terdiri dari

Panitera, Sekretaris, PPK, Panitera Muda Banding (PT dan PTA), Panitera Muda Perdata (PN), Panitera Muda Gugatan (PA), Panitera Muda Pidana (Dilmil), Panitera Muda Perkara (PTUN). Aceh yang diikuti oleh 123 peserta terdiri dari Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Panitera, Pejabat Pembuat Komitmen/ Bendahara.

B. Rekomendasi

Badan Pengawasan sebagai APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas beberapa kegiatan perlu lebih ditingkatkan adalah :

1. Kegiatan Assurance meliputi Pemeriksaan Kinerja dan Integritas, Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Reviu Laporan *Keuangan*, Reviu RKAKL, Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal.
2. Kegiatan Consulting meliputi : Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan, *Consulting* dalam rangka Peningkatan Pengawasan dan *Quality Assurance*

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, Kegiatan rutin Badan Pengawasan yang perlu dilaksanakan dan lebih ditingkatkan antara lain:

1. Inspeksi Mendadak (SIDAK)
2. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas
3. Audit Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI)